

Laporan PP 39 Triwulan II

Tahun Anggaran 2026



BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

Jl. Kimangunsarkoro No. 6, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50136



024 - 8316315



(024) 8414811

bbspjpi.kemenperin@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan YME atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Triwulan II tahun 2026 Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dapat disusun dan diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Triwulan II Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri tahun anggaran 2026 ini mencakup kegiatan yang dibiayai dari DIPA Tahun 2026 baik dari Rupiah Murni (RM) maupun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), untuk periode 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Dalam laporan ini juga memaparkan realisasi yang telah dicapai oleh Satker pada triwulan tersebut, serta pengawasan yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kinerja unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Demikian, laporan ini dibuat agar dapat menjadi informasi dan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran yang membangun sangat kami harapkan. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Semarang, Juli 2026

Kepala BBSPJPPI



Sofyari Rahman

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab. I Pendahuluan	1
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program	3
1.3. Struktur Organisasi	5
Bab. II Rencana Kegiatan	7
2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2025	7
2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	17
Bab. III Pelaksanaan Kegiatan	23
3.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja.....	23
3.1.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	23
3.1.2. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan	87
3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	99
3.2.1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	99
3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan.....	100
3.3. Langkah Tindak Lanjut	102
3.3.1. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja.....	102
3.3.2. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan	104
Bab. IV Penutup	105
4.1. Realisasi Kegiatan	105
4.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan.....	106
4.3. Saran dan Tindak Lanjut.....	107
Lampiran 1: Form Rencana Aksi	
Lampiran 2: Form Realisasi Rencana Aksi Triwulan II TA 2026	
Lampiran 3: Tabel Monitoring Rincian Output April-Juni 2026	
Lampiran 4: Form Emonev Bappenas TW II TA 2026	

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), sesuai penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BBSPJPPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerjasama, hubungan

masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga dan;

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Peran BBSPJPPI ke depan semakin strategis dalam mendukung pengembangan sektor industri yang berdaya saing dan berkelanjutan. Meningkatnya perhatian masyarakat, baik di tingkat nasional maupun global, terhadap aspek perlindungan lingkungan hidup menjadi salah satu tantangan yang dihadapi sektor industri. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, pengembangan sektor industri diarahkan pada penerapan konsep industri hijau yang menekankan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga tercapai keseimbangan antara pertumbuhan industri dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kondisi tersebut mendorong BBSPJPPI untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan layanan kepada masyarakat, khususnya sektor industri, sesuai dengan tugas dan kompetensi yang dimiliki. Dengan kompetensi inti di bidang pencegahan pencemaran industri, BBSPJPPI menyelenggarakan berbagai layanan jasa teknis yang meliputi:

- a Jasa Pelayanan Teknis Pengujian
 - Penanganan Pencemaran;
 - Pengujian Bahan dan Barang;
 - Standardisasi Pengujian Mutu Produk.
- b Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi
 - Kalibrasi Instrument
 - Kalibrasi Lingkungan
- c Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi
 - Sertifikasi Sistem Mutu
 - Sertifikasi Produk
 - Sertifikasi Industri Hijau
- d Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis
- e Jasa Pelayanan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri

- Konsultasi Keteknikan
- Rancang Bangun dan Rekayasa
- f Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri
 - Verifikasi Besaran Nilai TKDN dan Nilai BMP
- g Jasa Pelayanan Pemeriksaan Produk Halal
- h Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi

Dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel serta mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, khususnya sektor industri, BBSPJPPI telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Februari 2010. Penerapan pola pengelolaan keuangan BLU tersebut memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBSPJPPI dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.

1.2. LATAR BELAKANG KEGIATAN / PROGRAM

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi pertumbuhan industri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan tujuan organisasi dalam mendukung pertumbuhan industri dan peningkatan kontribusi industri terhadap PDB untuk 5 (lima) tahun kedepan memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Selaras dengan tujuan BSKJI tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) menetapkan tujuan organisasi yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jasa industri.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator

Kinerja Utama dengan Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Internal dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

Pada periode 2025-2029, BBSPJPPI akan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan BSKJI sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari kegiatan prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN 2025-2029, serta Kebijakan Industri Nasional 2025-2029, dimana BBSPJPPI akan berkontribusi pada pelaksanaan:

a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

b. Program Dukungan Manajemen.

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan untuk lingkup internal BBSPJPPI guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

Dalam menjalankan Program/Kegiatan tahunan sebagai bagian tahapan dari pelaksanaan rencana kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan, guna mendukung capaian target dan sasaran strategis sekaligus dukungan atas pelaksanaan Tupoksi diperlukan suatu perencanaan agar pelaksanaan Program/Kegiatan dapat terarah. Perencanaan memuat program/kegiatan beserta kebutuhan penganggaran untuk pelaksanaan 1 (satu) tahun anggaran, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja. Rencana Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan program/kegiatan sekaligus sebagai dasar acuan untuk menilai capaian/realisasi pelaksanaan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan di dalam dokumen Rencana Kinerja, telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis beserta

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang biasa disebut indikator kinerja disertai target kinerja.

Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring kinerja dalam bentuk pelaporan kinerja yang memuat informasi capaian kinerja. Dengan laporan tersebut akan diketahui sejauh mana kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu, disamping juga sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan pencapaian program kegiatan yang sedang berjalan dengan penyerapan/realisasi anggaran.

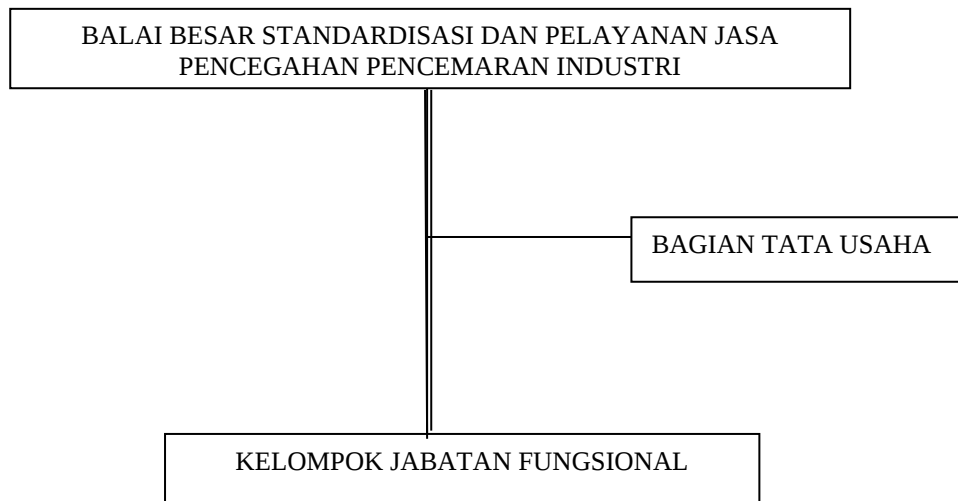
1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam mendukung kebijakan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan kebijakan Jasa Industri dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala setingkat Eselon II , Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha setingkat Eselon III dan kelompok jabatan Fungsional yang berada di bawah Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab langsung kepada kepala balai.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sementara Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana bagan berikut:



Gambar 1: Struktur Organisasi BBSPJPPI

Dalam pelaksanaannya, pembagian fungsi koordinasi dalam kelompok jabatan fungsional disusun dengan mengacu kepada Peta Proses Bisnis BBSPJPPI yang disesuaikan dan telah mengakomodir seluruh tugas dan fungsi BBSPJPPI sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022. Untuk mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan dari masing-masing fungsi koordinasi tersebut ditunjuk seorang pejabat fungsional sebagai Ketua Tim Kerja.

BAB. II

RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN

2.1. KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dalam melaksanakan tupoksi maupun dalam menjalankan proses bisnis jasa layanan selalu berpedoman pada visi dan misi yang menentukan arah, tujuan, dan sasaran pengembangan institusi serta peningkatan kompetensi di masa mendatang. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BBSPJPPI 2025-2029, Visi BBSPJPPI adalah *“Menjadi balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang berdaulat, maju dan berkelanjutan”*. Penetapan visi tersebut ditetapkan secara selaras dengan visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi BSKJI sesuai fungsi BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI. Kedepannya BBSPJPPI akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi kebutuhan industri di bidang standardisasi dan jasa industri yang sesuai dengan perkembangan regulasi maupun tuntutan pertumbuhan industri dalam upaya mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BBSPJPPI melaksanakan Misi *“Peningkatan kemandirian, daya saing, produktivitas dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau”*. Berkenaan dengan misi BBSPJPPI di atas, kedepannya BBSPJPPI akan mendukung misi BSKJI pada ciri ke 6 (Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing) dan ke 7 (Pelaksanaan tata Kelola yang baik/gppd governance dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif dan efisien) yaitu berkontribusi dalam mendukung pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing serta

pelaksanaan tata Kelola yang baik/ good governance dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif dan efisien.

Kebijakan penerapan standardisasi di sektor industri, secara mandiri maupun berkolaborasi mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi industri yang mendukung pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, penerapan standar industri hijau, implementasi industri 4.0 yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kemandirian dan daya saing industri serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Pada tahun 2026 berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, BBSPJPPI berkontribusi dalam mendukung Program Kementerian Perindustrian dan BSKJI pada :

1. Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri

Diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

2. Program Dukungan Manajemen

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal.

Terkait dengan pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian, BBSPJPPI pada 2026 memperoleh alokasi pagu anggaran awal sebesar Rp. 41.767.656.000,-. Dalam perjalanannya, seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan maupun perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran di tingkat internal BBSPJPPI, telah dilakukan beberapa kali proses revisi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

- a. Revisi ke-1 pada 30 Desember 2025, revisi dalam rangka pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026.

Satker BBSPJPPI memperoleh nilai efisiensi sebesar Rp. 4.457.328.000,- dalam rangka pemenuhan efisiensi untuk RO Prioritas Khusus dari sumber anggaran Rupiah Murni sebesar Rp. 123.202.000,- dan Blokir Kode A dari sumber anggaran Non RM sebesar Rp. 4.334.126.000,-.

Pemenuhan efisiensi untuk RO Prioritas Khusus mengurangi porsi anggaran pada DIPA BBSPJPPI TA 2026 sehingga besaran anggaran berkurang dari sebelumnya Rp. 41.767.656.000,- menjadi sebesar Rp. 41.644.454.000,-.

Dengan adanya pagu blokir menyebabkan pagu efektif menjadi sebesar Rp. 37.310.328.000,-

- b. Revisi ke-2 pada 10 Maret 2026, revisi dalam rangka realokasi anggaran BBSPJPPI Tahun 2026. Sehubungan dengan pemenuhan kekurangan anggaran operasional Kemenperin, BBSPJPPI memperoleh porsi pemenuhan realokasi anggaran sebesar Rp. 13.610.000,-. Pemenuhan dipenuhi melalui realokasi anggaran Rupiah Murni yang berasal dari RO 6042.EBA.994 Layanan Perkantoran yang berasal dari pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor. Adanya realokasi anggaran menyebabkan pagu anggaran mengalami perubahan dari semula Rp. 41.644.454.000,- berkurang menjadi Rp. 41.630.844.000,-. Dengan besaran pagu blokir tetap sehingga pagu efektif berubah menjadi sebesar Rp.37.296.718.000,-

- c. Revisi ke-3 pada 13 Maret 2025, revisi dalam rangka pemutakhiran revisi anggaran pada KPA yang mengubah Petunjuk Operasional Kegiatan. Usulan revisi ini mengakomodir penyesuaian akun belanja imbalan kerja pada transaksi BLU serta rekomposisi blokir dalam rangka pemenuhan anggaran untuk biaya pemeliharaan akreditasi LPK, pemenuhan tambahan biaya operasional layanan, biaya rutin operasional dan pemeliharaan perkantoran serta belanja modal terkait layanan dan sarpras perkantoran.

Revisi tanpa merubah pagu dan besaran blokir anggaran dengan besaran pagu total sebesar Rp. 41.630.844.000,- dan pagu efektif sebesar Rp. 37.296.718.000,-

- d. Revisi ke-4 pada 2 April 2026, revisi dalam rangka penggunaan saldo awal kas BLU.

Sebagai tindak lanjut komitmen pemanfaatan hasil efisiensi belanja BLU 2025, dilakukan pemanfaatan saldo awal kas BLU secara bertahap. Pada tahap I dilakukan revisi pemanfaatan saldo awal kas BLU sebesar Rp. 3.116.884.000,- yang digunakan untuk peningkatan kualitas layanan (pengadaan peralatan uji layanan pengujian lingkungan dan layanan kalibrasi lingkungan) sebesar Rp. Rp. 2.316.884.000,- dan penguatan sumber daya atau kapasitas layanan (pekerjaan peningkatan kapasitas ruang laboratorium pengujian) sebesar Rp. 800.000.000,-.

Berdasarkan pengesahan revisi, pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 44.747.728.000,- dengan pagu efektif sebesar Rp. 40.413.602.000,-

- e. Revisi ke-5 pada 27 April 2026, revisi dalam rangka penajaman belanja TA 2026.

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 99/SJ-IND/PR/IV/2026 tanggal 13 April 2026 perihal Penajaman Belanja Kementerian Perindustrian TA 2026, dilakukan revisi penajaman belanja pada DIPA BBSPJPPI sebesar Rp. 7.076.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni pada RO 6042.EBB.951 Layanan Sarana Internal yang berasal dari sisa kontrak Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan.

Pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 44.740.652.000,- dengan pagu efektif sebesar Rp. 40.406.526.000,-

Tabel 1 Pagu Anggaran Program BBSPJPPI 2026

Program / Kegiatan / KRO	Pagu Awal	Revisi 1	Revisi 2	Revisi 3
Anggaran BBSPJPPI	41.767.656.000	41.644.454.000	41.630.844.000	41.630.844.000
Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri	14.829.937.000	14.829.937.000	14.829.937.000	14.829.937.000
1. Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	14.829.937.000	14.829.937.000	14.829.937.000	14.829.937.000
Program Dukungan Manajemen	26.937.719.000	26.814.517.000	26.800.907.000	26.800.907.000
2. Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	26.937.719.000	26.814.517.000	26.800.907.000	26.800.907.000

Program / Kegiatan / KRO	Revisi 4	Revisi 5
Anggaran BBSPJPPI	44.747.728.000	44.740.652.000
Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri	17.946.821.000	17.946.821.000
1. Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	17.946.821.000	17.946.821.000
Program Dukungan Manajemen	26.800.907.000	26.793.831.000
2. Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	26.800.907.000	26.793.831.000

Berdasarkan persetujuan dan pengesahan revisi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2026 tersebut, maka Program/Kegiatan berikut besaran pagu anggaran BBSPJPPI Tahun Anggaran 2026 sebagaimana disajikan pada Tabel. 2 berikut :

Tabel 2. Program/Kegiatan BBSPJPPI Tahun Anggaran 2026

Program / Kegiatan / KRO	Pagu Anggaran Triwulan II		
	Pagu Terakhir	Blokir	Efektif
Anggaran BBSPJPPI	44.740.652.000	4.334.126.000	40.406.526.000
Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri	17.946.821.000	3.208.340.000	14.738.481.000
1. Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	17.946.821.000	3.208.340.000	14.738.481.000
KRO 1 : Sosialisasi dan Diseminasi	75.246.000	28.313.000	46.933.000
KRO 2 : Pelayanan Publik Kepada Industri	11.182.714.000	2.819.827.000	8.362.887.000
KRO 3 : Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	5.888.861.000	360.200.000	5.528.661.000
KRO 4 : Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	800.000.000	-	800.000.000
Program Dukungan Manajemen	26.800.907.000	1.132.862.000	25.668.045.000
2.Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	26.800.907.000	1.132.862.000	25.668.045.000
KRO 1 : Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	184.926.000	18.494.000	166.432.000
KRO 2 : Layanan Dukungan Manajemen Internal	24.671.553.000	606.812.000	24.064.741.000
KRO 3 : Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.101.349.000	51.304.000	1.050.045.000
KRO 4 : Layanan Manajemen SDM Internal	606.123.000	372.164.000	233.959.000
KRO 5 : Layanan Manajemen Kinerja Internal	236.956.000	84.088.000	152.868.000

Tabel 3. Klasifikasi Rincian Output dan Anggaran BBSPJPPI Tahun 2026

No.	Kode	Klasifikasi Rincian Output	Anggaran Sesuai Pagu Terakhir (Rp)	Blokir (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)
1	6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	75.246.000	28.313.000	46.933.000
2	6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	11.182.714.000	2.819.827.000	8.362.887.000
3	6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	5.888.861.000	360.200.000	5.528.661.000
4	6077.CBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	800.000.000	-	800.000.000
5	6042.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	184.926.000	18.494.000	166.432.000
6	6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24.671.553.000	606.812.000	24.064.741.000
7	6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.101.349.000	51.304.000	1.050.045.000
8	6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	606.123.000	372.164.000	233.959.000
9	6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	236.956.000	84.088.000	152.868.000
Total			44.740.652.000	4.334.126.000	40.406.526.000

Secara rinci rencana anggaran BBSPJPPI Tahun 2026 sesuai DIPA revisi ke-5 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rencana Anggaran BBSPJPPI Tahun 2026

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)			SD/CP
		DIPA Rev 5	Blokir	Efektif	
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	17.946.821.000	3.208.340.000	14.738.481.000	BLU
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	17.946.821.000	3.208.340.000	14.738.481.000	BLU
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	75.246.000	28.313.000	46.933.000	BLU

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)			SD/CP
		DIPA Rev 5	Blokir	Efektif	
101	Sosialisasi dan Diseminasi	75.246.000	28.313.000	46.933.000	BLU
52	Publikasi Layanan Jasa Teknis	75.246.000	28.313.000	46.933.000	BLU
A	Publikasi Layanan Jasa Teknis	75.246.000	28.313.000	46.933.000	BLU
6077.BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri	11.182.714.000	2.819.827.000	8.362.887.000	BLU
001	Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri	7.211.180.000	1.375.506.000	5.835.674.000	BLU
51	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	6.557.134.000	1.075.518.000	5.481.616.000	BLU
52	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian	654.046.000	299.988.000	354.058.000	BLU
002	Jasa penyelenggara uji profisiensi	123.360.000	22.876.000	100.484.000	BLU
51	Jasa Pelayanan Uji Profisiensi	81.900.000	12.546.000	69.354.000	BLU
A	Jasa Pelayanan Uji Profisiensi	81.900.000	12.546.000	69.354.000	BLU
52	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Uji Profisiensi	41.460.000	10.330.000	31.130.000	BLU
A	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	41.460.000	10.330.000	31.130.000	BLU
003	Jasa Pelayanan Produsen Bahan Acuan	62.430.000	18.815.000	43.615.000	BLU
51	Jasa pelayanan Produsen Bahan Acuan	8.240.000	4.120.000	4.120.000	BLU
52	Akreditasi/ Surveillance /Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Produsen Bahan Acuan	54.190.000	14.695.000	39.495.000	BLU
004	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	1.919.918.000	548.467.000	1.371.451.000	BLU
51	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	1.862.228.000	548.467.000	1.313.761.000	BLU
52	Akreditasi/ Surveillance /Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	57.690.000	0	57.690.000	BLU
005	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri	876.446.000	400.243.000	476.203.000	BLU
51	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	711.710.000	352.975.000	358.735.000	BLU
52	Akreditasi/ Surveillance /Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	164.736.000	47.268.000	117.468.000	BLU
006	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri	373.900.000	192.010.000	181.890.000	BLU
51	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	373.900.000	192.010.000	181.890.000	BLU
A	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	233.560.000	70.650.000	162.910.000	BLU
B	Bimbingan dan Pendampingan Teknis	140.340.000	121.360.000	18.980.000	BLU
008	Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Pencegahan Pencemaran Industri	399.020.000	158.400.000	240.620.000	BLU

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)			SD/CP
		DIPA Rev 5	Blokir	Efektif	
51	Layanan Konsultansi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	399.020.000	158.400.000	240.620.000	BLU
A.	Konsultansi Design IPAL dan Penyusunan Dokumen Pertek	142.540.000	40.540.000	102.000.000	BLU
B	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	256.480.000	117.860.000	138.620.000	BLU
009	Jasa Pelayanan Verifikasi	157.824.000	78.912.000	78.912.000	BLU
51	Jasa Pelayanan Verifikasi TKDN	157.824.000	78.912.000	78.912.000	BLU
010	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal	58.636.000	24.598.000	34.038.000	BLU
51	Penyelenggaraan Lembaga Pemeriksa Halal	37.000.000	18.500.000	18.500.000	BLU
52	Pengembangan Kelembagaan Jaminan Produk Halal	21.636.000	6.098.000	15.538.000	BLU
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	5.888.861.000	360.200.000	5.528.661.000	BLU
001	Peralatan Fasilitas laboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri	5.888.861.000	360.200.000	5.528.661.000	BLU
51	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan	5.888.861.000	360.200.000	5.528.661.000	BLU
A.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium	5.888.861.000	360.200.000	5.528.661.000	BLU
6077.CBL	Prasarana Bidang Perindustrian dan Perdagangan	800.000.000	-	800.000.000	BLU
001	Gedung Laboratorium/Workshop/Layanan Publik yang dibangun/direnovasi	800.000.000	-	800.000.000	BLU
WA	Program Dukungan Manajemen	26.793.831.000	1.125.786.000	25.668.045.000	RM & BLU
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri	26.793.831.000	1.125.786.000	25.668.045.000	RM & BLU
6042.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	184.926.000	18.494.000	166.432.000	BLU
51	Pengadaan Perangkat TIK	184.926.000	18.494.000	166.432.000	BLU
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24.671.553.000	606.812.000	24.064.741.000	RM & BLU
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	353.202.000	107.046.000	246.156.000	BLU
51	Pengelolaan Data dan Informasi	353.202.000	107.046.000	246.156.000	BLU
A.	Pengelolaan Data dan Informasi	353.202.000	107.046.000	246.156.000	BLU
962	Layanan Umum	353.624.000	171.362.000	182.262.000	BLU
51	Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga	353.624.000	171.362.000	182.262.000	BLU
A.	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	353.624.000	171.362.000	182.262.000	BLU
994	Layanan Perkantoran	23.964.727.000	328.404.000	23.636.323.000	RM&BLU
001	Gaji dan Tunjangan	19.050.750.000		19.050.750.000	RM
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	17.366.263.000		17.366.263.000	RM
B	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	1.684.487.000		1.684.487.000	RM

OUTPUT T	URAIAN	ANGGARAN (Rp)			SD/CP
		DIPA Rev 5	Blokir	Efektif	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.913.977.000	328.404.000	4.585.573.000	RM & BLU
A	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	1.723.872.000	99.480.000	1.624.392.000	RM& BLU
B	Langganan Daya Dan Jasa	945.939.000	72.000.000	873.939.000	BLU
C	Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Kantor	876.618.000	47.489.000	829.129.000	RM&BLU
D	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	315.678.000	28.128.000	287.550.000	RM & BLU
E	Pemeliharaan Alat Laboratorium	600.000.000	60.000.000	540.000.000	BLU
F	Pemeliharaan Sarana Kantor	183.070.000	18.307.000	164.763.000	RM & BLU
G	Pengadaan Bahan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	199.800.000	0	199.800.000	BLU
H	Penyelenggaraan Poliklinik	69.000.000	3.000.000	66.000.000	BLU
6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	1.094.273.000	44.228.000	1.050.045.000	RM & BLU
951	Layanan Sarana Internal	1.094.273.000	44.228.000	1.050.045.000	RM & BLU
51	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional	681.120.000	2.912.000	678.208.000	RM
53	Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran	413.153.000	41.316.000	371.837.000	BLU
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	606.123.000	372.164.000	233.959.000	BLU
954	Layanan Manajemen SDM	94.756.000	43.418.000	51.338.000	BLU
51	Pengelolaan/Manajemen SDM	94.756.000	43.418.000	51.338.000	BLU
996	Layanan Pendidikan Dan Pelatihan	511.367.000	328.746.000	182.621.000	BLU
51	Peningkatan Dan Pengembangan Kompetensi SDM	511.367.000	328.746.000	182.621.000	BLU
A	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis ASN	76.995.000	49.970.000	27.025.000	BLU
B	Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional	88.288.000	76.144.000	12.144.000	BLU
C	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	346.084.000	202.632.000	143.452.000	BLU
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	236.956.000	84.088.000	152.868.000	BLU
003	Layanan Kinerja Satker	185.080.000	64.480.000	120.600.000	BLU
051	Penyusunan Program Dan Kegiatan Satker	27.032.000	13.456.000	13.576.000	BLU
052	Pengelolaan Keuangan	158.048.000	51.024.000	107.024.000	BLU
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	27.332.000	13.516.000	13.816.000	BLU
051	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi	27.332.000	13.516.000	13.816.000	BLU
961	Layanan Reformasi Kinerja	24.544.000	6.092.000	18.452.000	BLU
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP	24.544.000	6.092.000	18.452.000	BLU

2.2. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

BBSPJPPI sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI dalam rangka mendukung pencapaian tujuan BSKJI dan tujuan BBSPJPPI telah menetapkan sasaran strategis yang mengacu pada sasaran strategis BSKJI sebagaimana tercantum dalam Peta Strategis BBSPJPPI. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja, telah ditetapkan pula indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 5. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026

Kode	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	1.Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri
		2.Terwujudnya layanan jasa industri yang professional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)
			2. Nilai Net Promoter Score (NPS)
		3.Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Indeks peningkatan penerimaan negara bukan pajak / PNBPN (Indeks)
			2. Jumlah hasil layanan jasa industri
			3. Nilai Revenue on Asset (RoA)

Kode	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen		
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	1. Terwujudnya SDM yang Profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)
		2. Penguatan Sistem Informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI
			2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
		3. Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien Profesional	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
			2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)
		4. Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker.
			2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
			3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan

Kode	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		5. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	1. Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Selain itu terkait dengan pelaksanaan anggaran sesuai DIPA BBSPJPPI TA 2026, telah ditetapkan target keluaran untuk masing-masing Klasifikasi Rincian Output (KRO) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6 berikut

Tabel 6. Klasifikasi Rincian Output dan Target Tahun 2026

No.	Kode	Klasifikasi Rincian Output	Target
1	6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	190 Orang
2	6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	823 Industri
3	6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	55 Unit
4	6077.CBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	1 Unit
5	6042.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	9 Unit
6	6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3 Layanan
7	6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	61 Unit
8	6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	105 Orang/Layanan
9	6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7 Dokumen

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, telah dilakukan penyusunan dan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dengan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sebagai bentuk komitmen dan kesepakatan atas kinerja

yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta dukungan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja BBSPJPPI Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Strategis BBSPJPPI Tahun 2025–2029, dengan target kinerja yang ditetapkan sesuai dengan target tahun berjalan sebagaimana tercantum dalam Renstra. Indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan berdasarkan indikator tujuan pada Peta Strategis BBSPJPPI.

Berdasarkan hasil pembahasan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada satuan kerja di lingkungan BSKJI, telah ditetapkan indikator dan target kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagaimana berikut:

Tabel 7. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Perkin BBSPJPPI Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Ket
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,68	indeks	IKU
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	990	Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	IKU
2.	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	88,5	Persen	Non IKU
		2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	41	Nilai	Non IKU
3.	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1.	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3	Persen	Non IKU
		2.	Jumlah hasil layanan jasa industri	8.000	Hasil Layanan	Non IKU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Ket
		3.	Nilai Revenue on Asset (RoA)	14,60	Persen	Non IKU
		4.	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	60	Persen	Non IKU
4.	Terwujudnya SDM yang profesional	1.	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,40	Indeks	Non IKU
5	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	40	Persen	Non IKU
		2	Tingkat Penerapan (SPBE)	78	Persen	Non IKU
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,64	Indeks	Non IKU
6.	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1.	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	62	Persen	Non IKU
		2.	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	73	Nilai	Non IKU
7.	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1.	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,45	Nilai	Non IKU
		2.	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93,40	Nilai	Non IKU
		3.	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75.25	Nilai	Non IKU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Ket
8	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	81	Persen	Non IKU

BAB. III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada awal tahun 2026 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) telah membuat Perjanjian Kinerja (Perkin) yang merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala BBSPJPPI kepada Kepala Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut dan menjadi kontrak kinerja Kepala BBSPJPPI.

Rencana kerja untuk mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya dirinci ke dalam rencana aksi setiap Triwulan yang dipantau secara berkala. Rencana aksi yang disusun guna mendukung upaya pencapaian target kinerja BBSPJPPI dapat dilihat pada lampiran.

3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

A. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Layanan Jasa Industri

Tabel 8. Pengukuran Realisasi Tujuan Triwulan II TA 2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 indeks	3,74	101,63 %	50%	50%	1] Penanganan dan pemantauan komplain/ keluhan pelanggan TW II	B4 - B6 : Penyebaran keusioner ke pelanggan dengan jumlah kuesioner yang

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
								2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW II 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW II	kembali Triwulan II TA 2026 sebanyak 143 buah dengan nilai 3,74.
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	990 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	532 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	53,74 %	50%	55%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada	B4-B6 : Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi sampai TW II sebanyak 532 perusahaan industri/pelaku usaha/instansi.

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
								pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW II.	

Tujuan terdiri dari dua Indikator Kinerja, meliputi :

1) Indikator Kinerja Tujuan 1.1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Tingkat kepuasan pelanggan pada satuan kerja diukur melalui hasil survei kepuasan pelanggan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode tertentu melalui penyebaran kuesioner yang telah diuji validitasnya. Tata cara penentuan responden, penyusunan kuesioner, serta penghitungan indeks mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara Daring.

a Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026, realisasi indikator kinerja ini sebesar 3,74 dari target sebesar 3,68 dengan capaian kinerja mencapai 101,63%. Adapun target fisik indikator adalah 50% dengan realisasi sebesar 50%. Jumlah pelanggan yang dilayani pada periode tersebut sebanyak 531 pelanggan dengan jumlah kuesioner yang terhimpun sebanyak 143 kuesioner.

Rencana kegiatan pada Triwulan II meliputi:

1. Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan Triwulan II;
2. Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan Triwulan II;
3. Evaluasi dan penghitungan statistik penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan II.

Realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bulan April:
 - a. Kuesioner yang masuk periode Januari–April 2026 sebanyak 72 kuesioner;
 - b. Hasil analisis IKM bulan April sebesar 3,71 berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.
2. Bulan Mei:
 - a. Kuesioner yang masuk periode Januari–Mei 2026 sebanyak 108 kuesioner;
 - b. Hasil analisis IKM periode Januari–Mei 2026 sebesar 3,73 berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.
3. Bulan Juni:
 - a. Kuesioner yang masuk periode Januari–Juni 2026 sebanyak 143 kuesioner;
 - b. Hasil analisis IKM periode Januari–Juni 2026 sebesar 3,74 berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

Tabel 9. Rekapitulasi Indeks IKM Triwulan II

Jumlah kuesioner	Indeks 1	Indeks 2	Indeks 3	Indeks 4
143	0	1	33	109

Dari data di atas, perbandingan realisasi dengan target fisik rencana kinerja sampai dengan Triwulan II telah berhasil dilaksanakan.

b Kendala

Tingkat partisipasi pelanggan dalam pengisian Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), dan Net Promoter Score (NPS) masih belum optimal sehingga menyulitkan pemenuhan jumlah responden yang ditetapkan.

Penyajian data jumlah dan identitas pelanggan belum terintegrasi serta masih tersebar pada masing-masing unit teknis. Kondisi tersebut mengakibatkan belum seluruh populasi pelanggan dapat dijadikan responden dalam pelaksanaan Survei IKM, IPAK, dan NPS.

c Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu rendahnya tingkat respons pelanggan dalam pengisian kuesioner yang disebarakan melalui saluran WhatsApp dan surat elektronik (e-mail). Selain itu, platform SINDII belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pengisian kuesioner. Kegiatan sosialisasi penyampaian dan pengisian kuesioner IKM melalui media sosial BBSPJPPI juga belum dilaksanakan secara optimal. Di samping itu, data jumlah dan identitas pelanggan belum terintegrasi dalam satu sistem terpadu.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah:

1. Membuat tampilan kuesioner yang lebih menarik, sehingga minat pelanggan untuk mengisi kuesioner semakin meningkat.
2. Optimalisasi platform SINDII sebagai sarana dan prasarana penyampaian dan pengisian kuesioner agar dapat terealisasi dimana pelanggan diharuskan mengisi kuesioner IKM sebelum mengunduh LHU.
3. Penjadwalan sosialisasi penyampaian dan pengisian kuesioner terintegrasi BBSPJPPI dilakukan setiap awal bulan.

4. Membuat dokumen data jumlah dan identitas pelanggan dalam satu pintu (rekapitulasi lengkap, terutama narahubung). Selain itu, dapat pula membuat database melalui SINDII berdasarkan nomor order layanan yang digunakan (nomor order masih dalam tahap pengembangan).

2)Indikator Kinerja Tujuan 1.2 : Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.

Jumlah realisasi layanan dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Hal ini mengingat kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan II TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 532 perusahaan industri/pelaku usaha/instansi dari target 990 perusahaan industri/pelaku usaha/instansi dengan capaian 53,74%.

Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 50% dengan realisasi 55%.

Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah:

- 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI
- 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan
- 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati
- 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI
- 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW II.

Realisasi fisik dari kegiatan sampai Juni 2026 adalah capaian realisasi layanan teknis berdasarkan jumlah transaksi/order dari periode bulan Januari sampai Juni berdasarkan data berikut :

Tabel 10. Jumlah Layanan Jasa Yang Digunakan Oleh Industri

No	Jenis Layanan	Satuan	Realisasi Layanan		
			Januari - April	Januari - Mei	Januari - Juni
1	Layanan Pengujian	Perusahaan/ pelaku industri/instansi	199	227	264
2	Layanan Kalibrasi		27	37	42
3	Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis		5	7	7
4	Layanan Sertifikasi		86	103	131
5	Layanan Inspeksi Teknik		0	0	0
6	Layanan Konsultansi (Penyusunan Pertek)		14	14	14
7	Layanan Teknologi Proses dan Mesin (peralatan AiMS)		0	0	0
8	Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan (Design IPAL)		1	1	1
9	Layanan Verifikasi (TKDN, GRK)		13	18	21
10	Layanan Pemeriksaan Produk Halal		1	1	11
11	Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi		28	40	41
12	Layanan Produsen Bahan Acuan		0	0	0
13	Layanan lainnya		0	0	0
		Total	374	448	532

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target telah berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Perbandingan realisasi dengan target indikator kinerja telah berhasil dicapai. Tetapi ada beberapa kendala yang mengakibatkan capaian belum optimal antara lain :

- Adanya identifikasi penurunan permintaan layanan pengujian penanganan pencemaran dikarenakan beberapa pelanggan beralih ke laboratorium milik DLH maupun kompetitor yang lebih murah.
- Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji

profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, audit CEMS, dan penjualan produk AiMS tetapi hasilnya belum optimal.

- Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPJPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPJPPI meski beragam promosi telah dilakukan.

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah industri untuk semua jasa layanan mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan II Tahun 2025. Pada Triwulan II 2026 belum ada kegiatan pameran yang bisa diikuti untuk sarana promosi layanan BBSPJPPI.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah meningkatkan promosi baik secara *online* maupun *offline* (pameran-pameran) , memperluas ruang lingkup layanan jasa yang terakreditasi, menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon, menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik melakukan jasa layanan di BBSPJPPI dan yang tidak kalah penting adalah semua pegawai menjadi agen pemasaran dan promosi bersama saat melakukan jasa layanan.

B. Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Profesional

Tabel 11.Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 1 Triwulan II TA 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai	88,5 Persen	99,39 Persen	112,31	50%	50%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan	B4-B6 : 1.Melakukan penyelesaian semua jenis layanan sesuai SPM.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
		Service Level Agreement (SLA)						n jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW II 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW II. 5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan	2. Pemeliharaan peralatan 3. Monitoring dan evaluasi SPM layanan secara berkala. 4. Total sampel Bulan Januari-Juni 3.459 sampel. Sedangkan sampel yang sesuai SPM sebanyak 3.438 sampel. Sehingga SPM sebesar 99,39 %.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
								pelanggan . 6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontraktor untuk pengujian yang disubkontrakkan.	
		2. Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	41 nilai	69 nilai	168,29	50%	50%	1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW II.	B4 – B6: jumlah responden sampai Juni 2026 sebanyak 143 responden dengan promotor 102 responden, passives 38 pelanggan dan detractors 3 pelanggan

Sasaran Kegiatan 1, mempunyai dua Indikator Kinerja Sasaran yaitu

1) Indikator Kinerja Sasaran 1.1 : Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA).

Persentase Pemenuhan Waktu Layanan Sesuai Service Level Agreement (SLA) merupakan indikator yang mengukur tingkat kepatuhan balai dalam memberikan layanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SLA atau Standar Pelayanan Minimal (SPM). Indikator ini mencerminkan efisiensi dan keandalan layanan yang diberikan kepada pengguna, di mana semakin tinggi persentasenya, semakin baik kepatuhan terhadap standar waktu layanan yang dijanjikan.

Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%.

Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA =

$$\left(\frac{\sum \text{Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SPM}}{\sum \text{Pelayanan yang diberikan}} \right) \times 100\%$$

a. Hasil yang telah dicapai dan Analisa capaian Kinerja

Pada Triwulan II TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 99,39 % dari target 88,5 persen dengan capaian 112,31 %.

Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %.

Total order/SPK/transaksi Januari-Juni 2026 sebesar 3.459 order/SPK/transaksi sedangkan jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) adalah 3.438 order/SPK/transaksi.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan
2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi
3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW II
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW II
5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan

6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang disubkontrakkan.

Realisasi Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan II adalah

Tabel 12. Perhitungan SLA Januari – Juni 2026

Layanan	Januari - Juni	
	Jumlah sampel/ transaksi/Order	Sampel sesuai SPM
Layanan Pengujian	2915	2902
Layanan Kalibrasi	345	343
Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis	38	38
Layanan Sertifikasi	132	126
Layanan Inspeksi Teknik	0	0
Layanan Konsultansi (Penyusunan Pertek)	0	0
Layanan Teknologi Proses dan Mesin (peralatan AiMS)	0	0
Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekrayasaan (Design IPAL)	0	0
Layanan Verifikasi (TKDN, GRK)	21	21
Layanan Pemeriksaan Produk Halal	8	8
Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi	0	0
Layanan Produsen Bahan Acuan	0	0
Layanan lainnya	0	0
Total	3459	3438

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan

b. Kendala.

Perhitungan SLA masih manual sehingga rawan human error.

c. Rekomendasi

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan :

1) Terdapat layanan yang memang belum dapat dihitung SLA nya dikarenakan kegiatan berdurasi panjang dan belum selesai hingga pelaporan, contoh : layanan PUP masih masa pendaftaran, layanan konsultansi dengan waktu pekerjaan sesuai kontrak kerjasama

2) SLA layanan berbasis kontrak dihitung berdasarkan kesepakatan waktu penyelesaian pekerjaan yang tertera pada kontrak, contoh: layanan konsultasi, teknologi proses dan mesin

Tindak lanjut di triwulan selanjutnya adalah :

- Dilakukan pengulangan verifikasi data kepada masing-masing tim untuk memitigasi terjadinya *human error*.

2)Indikator Kinerja Sasaran 1.2 : Nilai *Net Promoter Score* (NPS)

NPS adalah metrik yang digunakan untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan, dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain. NPS sering dianggap sebagai prediktor utama pertumbuhan perusahaan.

NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: “Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?” Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10.

Kategorisasi responden:

>**Promoters (9-10)**: Pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain.

>**Passives (7-8)**: Pelanggan yang cukup puas tetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor.

>**Detractors (0-6)**: Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan.

NPS dihitung dengan mengurangi persentase *Detractors* dari persentase *Promoters*:

$$NPS = \%Promoters - \%Detractors$$

Skor NPS dapat berkisar dari -100 (semua pelanggan adalah *Detractors*) hingga +100 (semua pelanggan adalah *Promoters*)

Kriteria Penilaian

- Nilai - 100 sampai 0 -> tidak baik
- Nilai 0 sampai 100 -> baik

a. Hasil yang telah dicapai dan Analisa capaian Kinerja

Pada Triwulan II TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 69 dari target 41 Nilai dengan capaian 168,29 %.

Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 50% dengan realisasi 50%.

Tabel 13. Kategori pelanggan dalam NPS Januari – Juni 2026

Kategori	Jumlah
<i>Promoters</i>	102
<i>Passives</i>	38
<i>Detractors</i>	3
Total	143

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

- 1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan.
- 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian *Net Promoter Score* (NPS) TW I.

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan II adalah

1. Bulan April

- Kuesioner kembali sampai Bulan April sebanyak 72 kuesioner dengan rincian *promoters* sebanyak 54 pelanggan, *passives* 17 pelanggan dan *detractors* 1 pelanggan.
- Hasil analisa NPS sampai dengan bulan April 2026 adalah sebesar 74.

2. Bulan Mei

- Kuesioner kembali sampai Bulan Mei sebanyak 108 kuesioner dengan rincian *promoters* sebanyak 78 pelanggan, *passives* 28 pelanggan dan *detractors* 2 pelanggan
- Hasil analisa NPS sampai dengan bulan Mei 2026 adalah sebesar 70.

3. Bulan Juni

- Kuesioner kembali sampai Bulan Juni sebanyak 143 kuesioner dengan rincian *promoters* sebanyak 102 pelanggan, *passives* 38 pelanggan dan *detractors* 3 pelanggan
- Hasil analisa NPS sampai dengan bulan Juni 2026 adalah sebesar 69.

Dari data di atas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

b. **Kendala**

Jumlah responden pengisian NPS mengikuti jumlah responden pengisian IKM dimana tingkat pengembalian kuesioner masih rendah dibanding jumlah kuesioner yang disebar. Salah satu penyebabnya karena pada sistem SINDIi sebelum perusahaan mengunduh LHU mandiri tidak ada keharusan masuk ke tautan kuesioner, sehingga pengisian kuesioner bisa tidak dilakukan. Selain itu belum terintegrasinya penyajian data jumlah dan identitas pelanggan (masih terpisah-pisah pada masing-masing bagian teknis) sehingga tidak semua populasi dapat diberikan survey NPS.

c. **Rekomendasi**

Evaluasi dari kegiatan ini adalah masih sedikitnya jumlah pelanggan yang mengisi kuesioner yang diblasting melalui WA dan email, platform SINDIi belum bisa digunakan sebagai sarana pengisian kuesioner, sosialisasi penyampaian dan pengisian kuesioner NPS belum dilaksanakan di media sosial BBSPJPPI serta data jumlah dan identitas pelanggan belum terintegrasi dalam satu pintu.

Tindak lanjut di triwulan selanjutnya adalah melakukan berbagai strategi untuk menarik minat pelanggan supaya mengisi survey NPS sehingga kuesioner yang diberikan mendapatkan *feedback* yang kembali ke BBSPJPPI seperti: menargetkan pelanggan yang datang ke BBSPJPPI (mengantar sampel uji) untuk langsung mengisi kuesioner di penerimaan contoh; melakukan blasting WA dan email secara lebih intens dan terjadwal, komunikasi efektif, serta sosialisasi melalui media sosial BBSPJPPI. Platform SINDIi bisa digunakan sebagai sarana dan prasarana keharusan

pelanggan untuk mengisi survey NPS sebelum mengunduh laporan hasil uji.
Untuk pelanggan sertifikasi, verifikasi TKDN, dan PUP, survey NPS diberikan setelah pelaksanaan audit, surveilan maupun verifikasi.

C. Sasaran Kegiatan 2 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Mandiri

Tabel 14. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 2 Triwulan II TA 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						TARGET	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
1	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3 indeks	-	-	50%	50%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan 5] Monitoring dan Evaluasi	B4: Penerimaan sampai Bulan April 2026 sebesar Rp. 5.846.992.952 (27,4%) dari target Rp. 21.351.876.00 0,- B5: Penerimaan sampai Bulan Mei 2026 sebesar Rp. 6.910.096.818, - (32,36% dari target). B6: Penerimaan PNBP BBSPJPPI sampai dengan Bulan Juni 2026 sebesar

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
								Capaian TW II.	Rp. 8.376.976.815, - (39,23 % dari target)
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	8.000 hasil layanan	3720 hasil layanan	46,5 %	50%	50%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi	B4: Jumlah layanan jasa industri April 2026 sebesar 2.237 hasil layanan. B5: Jumlah layanan jasa industri sampai Mei 2026 sebesar 3.027 hasil layanan B6: Jumlah layanan jasa industri sampai Juni 2026 sebesar 3.720 hasil layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
								Capaian TW II.	
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14.60%	6,42%	43,97%	50%	50%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan.	B4-6 : 1.Melakukan monitoring penerimaan BLU April-Juni 2026 2. Melakukan pertanggungjawaban belanja modal berupa pembelian TIK, perangkat dan mesin, dan modal lainnya April-Juni 2026 3. Updating nilai buku asset satuan kerja Bulan Juni 2026. Dimana Penerimaan Rp 8.376.976.815, - sedangkan asset tetap Rp.130.518.821.559
		4. Rasio Pendapatan	60 Persen	52,71 Persen	87,85%	50%	50%	1] Melakukan monitoring	B4-B6 : 1.Melakukan monitoring

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
		Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)						penerimaan BLU 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional.	penerimaan BLU Bulan April-Juni 2026. 2.Melakukan pertanggungjawaban belanja pegawai dan belanja barang RM April-Juni 2026. 3.Melakukan pengesahan penerimaan dan pengeluaran BLU periode April-Juni 2026 4.Membuat jurnal balik atas transaksi akrual tahun 2025 yang mempengaruhi Laporan Operasional Satker. Dimana pendapatan operasional Rp.8.376.976.815,-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
									sedangkan belanja operasional Rp15.891.531.469,-

Sasaran Kegiatan 2, mempunyai empat Indikator Kinerja Sasaran yaitu

1. Indikator Kinerja Sasaran 2.1 : Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Salah satu tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah penyelenggaraan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknis, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis, serta layanan jasa industri lainnya. Realisasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan tersebut perlu diukur dan dievaluasi peningkatannya setiap tahun sebagai salah satu indikator kinerja UPT di lingkungan BSKJI.

Peningkatan PNBP dari layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan dapat memperluas peran BSKJI dalam mendukung implementasi kebijakan standardisasi industri serta mewujudkan layanan jasa industri yang lebih mandiri.

Selain itu, dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, serta dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang mengedepankan prinsip efisiensi dan produktivitas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.05/2010, BBSPJPPI telah ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Sejalan dengan status tersebut, pencapaian kinerja layanan jasa teknis kepada pelanggan diharapkan setiap tahun mengalami peningkatan, baik dari aspek

kualitas layanan maupun kuantitas realisasi penerimaan PNBPN.

Cara menghitungnya adalah sebagai berikut :

Menghitung persentase peningkatan PNBPN dengan menghitung selisih jumlah PNBPN pada tahun ke-n (B) dan jumlah PNBPN pada tahun **2024 sebagai baseline** (A) dibagi A dikalikan 100%.

$$\text{Persentase Peningkatan PNBPN} = \frac{B-A}{A} \times 100\%$$

Indeks ditentukan berdasarkan range persentase peningkatan PNBPN sebagai berikut:

Indeks	Range Peningkatan PNBPN
1	$\leq 5\%$
2	$5 < x \leq 20\%$
3	$20 < x \leq 50\%$
4	$50 < x \leq 100\%$
5	>100

a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026, realisasi indikator kinerja belum dapat dihitung secara final karena data penerimaan PNBPN masih bersifat sementara dan belum merupakan data akhir tahun. Adapun target indikator kinerja sebesar 3 indeks. Sementara itu, target fisik indikator adalah 50% dengan realisasi sebesar 50%.

Rencana kegiatan pada Triwulan II meliputi:

1. Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI;
2. Penyusunan penawaran dan kontrak kerja sama jasa layanan;
3. Pemberian jasa layanan teknis kepada industri sesuai permintaan yang disepakati;
4. Pelaksanaan komunikasi yang efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan dalam rangka menjaga loyalitas pelanggan terhadap BBSPJPPI;
5. Monitoring dan evaluasi capaian Triwulan II.

Realisasi kegiatan pada Triwulan II meliputi:

1. Pelaksanaan promosi layanan kepada pelanggan;

2. Penyusunan kontrak penawaran jasa layanan;
3. Pemberian jasa layanan teknis kepada pelanggan sesuai permintaan yang telah disepakati.

Realisasi penerimaan PNBP periode Januari–Juni 2026 sebesar Rp8.376.976.815 dari target sebesar Rp21.351.876.000 atau mencapai 39,23%. Sebagai pembandingan, baseline penerimaan tahun 2024 sebesar Rp15.500.000.000.

Tabel 15. Penerimaan Triwulan II 2026

No	Jasa Layanan	Jumlah (Rp)
1	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	4.729.899.650
2	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	1.255.110.000
3	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	1.180.774.500
4	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis	108.960.000
5	Jasa Pelayanan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	376.181.840
6	Jasa Pelayanan Inspeksi dan Verifikasi Teknis	474.412.000
7	Penyelenggara Uji Profisiensi	87.543.500
8	Jasa Sertifikasi Halal	93.444.500
9	Pendapatan sewa alat	3.040.000
10	Penerimaan lain-lain/Titipan	-
11	Jasa Giro BLU	67.610.825
	JUMLAH	Rp. 8.376.976.815

Dari data di atas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBSPJPPI belum optimal, antara lain sebagai berikut:

1. Adanya kompetitor layanan sejenis, termasuk adanya himbauan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada industri untuk melakukan pengujian pada laboratorium yang dimiliki DLH;
2. Persaingan dengan penyedia layanan sejenis yang menawarkan tarif lebih rendah;
3. Ruang lingkup layanan pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi yang masih terbatas;
4. Pengembangan layanan baru seperti Penyelenggara Uji Profisiensi, pemeriksaan halal, verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta penjualan produk AiMS masih belum memberikan hasil yang optimal.
5. Proses penagihan pada kontrak kerja sama pemantauan lingkungan yang relatif kompleks dan memerlukan waktu penyelesaian yang cukup panjang;
6. Tingkat pemahaman dan informasi masyarakat terhadap kompetensi serta ruang lingkup layanan BBSPJPPI yang masih terbatas.

c) **Rekomendasi**

Evaluasi pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Triwulan II masih belum mencapai tingkat yang sama dengan realisasi Triwulan II Tahun 2025.

Sebagai upaya perbaikan pada triwulan berikutnya, direncanakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan promosi layanan baru BBSPJPPI yang meliputi uji RATA, CGA, CEMS, Uji Profisiensi, pemeriksaan halal, TKDN, dan Lembaga Sertifikasi Produk (LSP) melalui penyusunan portofolio layanan yang komprehensif serta penguatan jejaring kerja (networking), termasuk pemanfaatan media sosial resmi balai dan partisipasi dalam kegiatan pameran;
2. Meningkatkan jumlah ruang lingkup pengujian dan kalibrasi yang terakreditasi dengan harga yang kompetitif melalui upaya modernisasi

peralatan;

3. Mendorong pengembangan jasa layanan baru yang memiliki potensi peningkatan PNBPN, antara lain kalibrasi Air Quality Monitoring System (AQMS), sertifikasi profesi, serta verifikasi dan validasi gas rumah kaca (GRK);
4. Memperkuat pelaksanaan layanan baru melalui Pengujian, Uji Profisiensi (PUP) melalui bimbingan teknis kepada sumber daya manusia terkait serta persiapan proses akreditasi;
5. Memperkuat komunikasi dan hubungan dengan calon pelanggan layanan baru serta konsultan independen, khususnya pada layanan verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal, guna meningkatkan minat penggunaan layanan BBSPJPPI.

2. Indikator Kinerja Sasaran 2.2 : Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan BSKJI adalah pelayanan jasa industri yang meliputi rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis, serta layanan jasa industri lainnya.

Catatan:

1. Hasil layanan yang dihitung merupakan layanan jasa yang telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pembayaran pada tahun berjalan;
2. Hasil layanan yang dihitung merupakan layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berbayar.

Penghitungan jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n (tahun berjalan) merupakan penjumlahan seluruh hasil layanan jasa dalam tahun berjalan dengan satuan sebagai berikut:

1. Layanan Pengujian: Laporan Hasil Uji;
2. Layanan Kalibrasi: Laporan Hasil Kalibrasi;
3. Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis: Sertifikat/Laporan;
4. Layanan Sertifikasi: Sertifikat/Laporan Hasil Surveillance;

5. Layanan Inspeksi Teknik: Laporan Hasil Inspeksi;
6. Layanan Konsultasi: Laporan Hasil Konsultasi/Kajian;
7. Layanan Teknologi Proses dan Mesin: Laporan Hasil Teknologi Proses dan Mesin;
8. Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri: Laporan Hasil Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri;
9. Layanan Verifikasi: Laporan Hasil Verifikasi;
10. Layanan Pemeriksaan Produk Halal: Laporan Hasil Pemeriksaan;
11. Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi: Laporan Hasil Uji;
12. Layanan Produsen Bahan Acuan: Sampel;
13. Layanan lainnya: Laporan/Order/Surat Perintah Kerja (SPK)/Rekomendasi.

a Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan II TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 3.720 Hasil Layanan dari target 8.000 Hasil Layanan dengan capaian 46,5%. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %. Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

- 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI
- 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan
- 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati
- 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI
- 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan II adalah

- 1] Melakukan promosi jasa layanan BBSPJPPI
- 2] Memberikan jasa layanan ke pelanggan sesuai kesepakatan.
- 3] Menjalin komunikasi yg efektif ke pelanggan
- 4] Monitoring dan evaluasi capaian jumlah hasil layanan jasa industri.

Tabel 16. Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri Triwulan II Tahun 2026

Jasa Layanan	Satuan	Januari-Juni
Layanan Pengujian	LHU	3061
Layanan Kalibrasi	LHU	389
Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis	Sertifikat/Laporan	38
Layanan Sertifikasi	Sertifikat/Hasil surveilen	130
Layanan Inspeksi Teknik	Laporan Hasil Inspeksi	0
Layanan Konsultasi (Penyusunan Pertek)	Laporan Hasil Konsultasi/Kajian	14
Layanan Teknologi Proses dan Mesin (peralatan AiMS)	Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin	-
Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekrayaan (Design IPAL)	Laporan Hasil RBPI	1
Layanan Verifikasi (TKDN, GRK)	Laporan Verifikasi	79
Layanan Pemeriksaan Produk Halal	Lapran Hasil Pemeriksaan	8
Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi	Laporan Hasil Uji	0
Layanan Produsen Bahan Acuan	Sampel	0
Layanan lainnya	Laporan/order/SPK	0
Total		3.720

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

b Kendala.

Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan capaian indikator jumlah layanan jasa industri belum optimal, yaitu sebagai berikut:

1. Persaingan dengan penyedia layanan sejenis yang menawarkan tarif layanan lebih kompetitif;
2. Sebagian pelanggan, khususnya pada layanan pengujian, beralih menggunakan laboratorium lain sebagai penyedia jasa;
3. Layanan baru yang telah dikembangkan, seperti Penyelenggara Uji Profisiensi, Pemeriksaan Halal, Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan penjualan produk AiMS, belum memberikan

peningkatan jumlah pelanggan yang optimal.

4. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap kompetensi dan ruang lingkup layanan BBSPJPPI, khususnya layanan baru, masih belum optimal sehingga pemanfaatan layanan belum meningkat secara signifikan meskipun berbagai kegiatan promosi telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi, belum optimalnya capaian indikator jumlah layanan jasa industri dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa tingginya persaingan antarpenyedia jasa industri, serta faktor internal berupa masih terbatasnya penetrasi layanan baru kepada pasar sasaran. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pertumbuhan jumlah pelanggan dan volume layanan yang diberikan pada Triwulan II. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pemasaran yang lebih terarah, peningkatan nilai tambah dan daya saing layanan, perluasan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan, serta optimalisasi promosi berbasis kebutuhan pelanggan guna meningkatkan jumlah layanan jasa industri pada triwulan berikutnya.

c Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026, upaya promosi layanan BBSPJPPI belum dapat dilaksanakan secara optimal karena belum terdapat kegiatan pameran yang dapat diikuti sebagai media promosi dan perluasan jejaring pelanggan. Selama periode pelaporan, kegiatan promosi lebih difokuskan melalui media komunikasi resmi BBSPJPPI, baik media sosial maupun media informasi lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya jangkauan promosi, khususnya dalam memperkenalkan layanan baru kepada calon pelanggan dan memperluas pangsa pasar layanan jasa industri.

Sebagai upaya peningkatan capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya, akan dilakukan beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kegiatan promosi layanan secara daring (online) maupun luring (offline), termasuk melalui keikutsertaan pada pameran, forum bisnis, dan kegiatan promosi lainnya;

- 2) Memperluas ruang lingkup layanan jasa yang terakreditasi guna meningkatkan daya saing dan memenuhi kebutuhan pelanggan;
- 3) Memperkuat kapabilitas layanan melalui kerja sama dengan mitra/subkontrak yang kompeten untuk mendukung penyediaan layanan yang belum dapat dilaksanakan secara mandiri;
- 4) Mengintensifkan komunikasi dan penguatan hubungan dengan calon pelanggan serta konsultan independen, khususnya untuk layanan Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Pemeriksaan Halal, guna meningkatkan pemanfaatan layanan BBSPJPPI;
- 5) Mendorong seluruh pegawai BBSPJPPI untuk berperan aktif sebagai agen promosi (service ambassador) dalam setiap pelaksanaan layanan, sehingga informasi mengenai kompetensi dan ruang lingkup layanan BBSPJPPI dapat tersampaikan secara lebih luas kepada pelanggan dan pemangku kepentingan.

3. Indikator Kinerja Sasaran 2.3 : Nilai *Revenue on Asset* (RoA)

Nilai *Revenue on Asset* (RoA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas di balai dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total pendapatan operasional dengan total nilai aset yang digunakan dalam operasional instansi. Semakin tinggi nilai RoA, semakin baik tingkat produktivitas aset dalam menghasilkan pendapatan.

Cara menghitungnya yaitu Menghitung PNPB layanan jasa yang diperoleh pada tahun ke-n dibagi dengan total nilai aset pada tahun ke- n (tahun berjalan) dikalikan 100%.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan II TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 6,42 persen dari target 14,60 persen dengan capaian 43,97 % . Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU
2. Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU

3. Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan II adalah

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU Bulan April-Juni 2026
2. Melakukan pertanggungjawaban belanja modal berupa pembelian perangkat TIK, peralatan dan mesin, dan modal lainnya.
3. Melakukan perhitungan nilai aset tetap berdasarkan nilai buku.

$$\begin{aligned}\text{Perhitungan ROA} &= \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Total Aset tetap}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.8.376.976.815}}{\text{Rp.130.518.821.559}} \times 100\% \\ &= 6,42 \, \%.\end{aligned}$$

b. Kendala.

Pada awal Juli masih terdapat aset yang belum diregister pada Neraca per bulan Juni 2026 mengakibatkan nilai aset belum dapat dihitung dengan tepat.

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pada awal Juli 2026 belum dilakukan tutup periode Juni 2026, perhitungan nilai RoA hanya berdasarkan cetakan neraca yang paling update.

Tindak lanjutnya adalah dilakukan pendetailan terhadap pembelian aset yang telah diinput oleh operator komitmen, atau RoA dihitung menggunakan nominal yang tersaji pada Neraca Bulan Juni 2026.

4. Indikator Kinerja Sasaran 2.4 : Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)

Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian UPT atas operasional layanannya dari beban operasional yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut juga sebagai rasio kemandirian UPT.

Menghitung Pendapatan Operasional (PNBP) tahun ke-n dibagi realisasi biaya operasional tahun ke-n dikalikan 100% ditambah capaian tambahan.

$$POBO = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\%$$

Catatan:

1. Nilai PNBP pada indikator ini sama dengan nilai PNBP pada indikator “Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”.
2. Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran RM APBN dan pendapatan PNBP, **tidak termasuk** penyusutan, dan amortisasi.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan II TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 52,71 % dari target 60% dengan capaian 87,85% .Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

- 1] Melakukan monitoring penerimaan BLU
- 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan II adalah

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU Bulan April - Juni 2026.
2. Melakukan pertanggungjawaban belanja pegawai dan belanja barang RM Bulan April-Juni 2026.
3. Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja BLU periode April - Juni 2026.
4. Membuat jurnal balik atas transaksi akrual tahun 2025 yang mempengaruhi Laporan Operasional Satker.

Pendapatan Operasional : Rp. 8.376.976.815,-

Belanja Operasional (tidak termasuk penyusutan, dan amortisasi) : Rp. 15.891.531.469,-

$$\begin{aligned} POBO &= \frac{Rp.8.376.976.815}{Rp.15.891.531.469} \times 100\% \\ &= 52,71 \% \end{aligned}$$

b. Kendala

- 1] Belum dilakukannya input pemakaian transaksi persediaan serta
- 2] belum dilakukan tutup periode bulan Juni 2026 sehingga pada awal bulan Juli 2026 Laporan Operasional belum dapat merepresentasikan jumlah belanja operasional dengan tepat.

c. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, sampai dengan awal Juli 2026 belum dilakukan penutupan periode (closing) bulan Juni 2026. Oleh karena itu, perhitungan rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) masih menggunakan data pada Laporan Operasional yang paling mutakhir (update) dan bersifat sementara. Kondisi tersebut mengakibatkan nilai rasio POBO yang disajikan masih berpotensi mengalami perubahan setelah proses penutupan periode dan penyempurnaan pencatatan transaksi selesai dilakukan.

Sebagai upaya meningkatkan akurasi penyajian data dan ketepatan perhitungan rasio POBO, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pendetailan transaksi persediaan segera setelah operator komitmen menyelesaikan input transaksi pembelian persediaan, sebelum proses pengesahan pada bulan berjalan, sehingga beban persediaan pada Laporan Operasional dapat tersaji lebih akurat meskipun proses penutupan periode belum dilaksanakan.
2. Melakukan perhitungan rasio POBO menggunakan Laporan Operasional yang paling mutakhir sebagai dasar pelaporan sementara, kemudian melakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan setelah proses penutupan periode bulan Juni 2026 selesai dilaksanakan sesuai arahan Biro Keuangan.

D. Sasaran Kegiatan 3 : Terwujudnya SDM yang professional

Tabel 17. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 3 Triwulan II TA 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan II	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya SDM yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81.40 Indeks	81.40 Indeks	100%	50	50	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW II.	B 4-6 : 1.Monitoring kesesuaian usulan rencana pelatihan dan ketersediaan anggaran 2025. 2.Fasilitasi diklat 3.Pembaharuan informasi pendidikan dan pelatihan pegawai.

Sasaran Kegiatan 3 mempunyai satu Indikator Kinerja yaitu **Indikator Kinerja : Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)**

1) Indikator Kinerja Sasaran 3.1 : Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesional ASN adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Dimana pelatihan tidak dibatasi jam pelajaran, dan sifat pelatihan tidak terbatas pada pelatihan yang terkait layanan jasa. Selain pelatihan yang bersifat baku, kegiatan peningkatan kompetensi lainnya seperti Bimtek, *Workshop*, Seminar dan sebagainya dapat diakui.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan II TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 81,40 indeks dari target 81,40 indeks dengan capaian 100 %. Nilai ini berdasarkan perhitungan mandiri tim Pokja OSDM BBSPJPPI. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %.

Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah :

- 1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural.
- 2) Pelaksanaan workshop/Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai.
- 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala.
- 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW II.

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah :

Bulan April :

1. Monitoring Kesesuaian Usulan Rencana Pelatihan dan Ketersediaan Anggaran 2025.
2. Pembaruan data pelatihan dan pendidikan SDM

3. Fasilitasi Diklat Struktural/Fungsional (Koordinasi dengan manajemen & pengelola keuangan terkait ketersediaan anggaran pelatihan Struktural dan Fungsional)
4. Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi (Bimbingan Teknis Kearsipan Kementerian Perindustrian Tahun 2026; Pelatihan Penulisan Policy Paper; Training Officer Course; Belajar Mandiri Microlearning Pengadaan Pegawai).

Bulan Mei :

1. Menyesuaikan rencana peningkatan kompetensi berkaitan dengan Efisiensi Anggaran.
2. Pembaruan data pelatihan dan pendidikan SDM.
3. Fasilitasi Diklat Struktural/Fungsional (Koordinasi dengan BPSDMI & Ses.BSKJI terkait jadwal Pelatihan Fungsional)
4. Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi (Pelatihan Gamifikasi Permenpan 1 Tahun 2023; Pelatihan Kalibrasi Mikropipet Berdasarkan SNSU PK.M-01:2024; Sharing Session Dengan Tema ASN Inspiratif:

Bulan Juni :

- 1) Menyesuaikan rencana peningkatan kompetensi berkaitan dengan Efisiensi Anggaran
- 2) Pembaruan data pelatihan dan pendidikan SDM (Fasilitasi Ujian Penyesuaian Ijazah 2 orang)
- 3) Fasilitasi Diklat Struktural/Fungsional (Koordinasi dengan BPSDMI & Ses.BSKJI terkait jadwal Pelatihan Fungsional)
- 4) Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi (Cyber Security Digital Bootcamp : From Zero To Ethical Hacker Angkatan II; Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Halal; E-Learning Modul Coretax Pemotongan, Pemungutan, dan Pelaporan PPh Unifikasi dan PPN Bagi Instansi Pemerintah (Open Access) Angkatan I Tahun 2026).

b. Kendala

Tidak ada kendala tetapi ada beberapa hal yang jika diatasi bisa meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN seperti :

1. Realisasi PKN belum dapat direncanakan karena pimpinan masih melaksanakan tugas tambahan khusus diluar satker BBSPJPPI
2. Blokir Anggaran tahun 2026 mengakibatkan volume rencana peningkatan kompetensi SDM untuk kebutuhan layanan jasa baru tertunda
3. Beberapa Jabatan Fungsional memiliki kuota terbatas dan berbayar sehingga ada ketergantungan dengan penyelenggara (instansi pembina) & ketersediaan anggaran
4. Untuk Workshop/ Seminar/ Webinar/ Bimtek tidak menerbitkan sertifikat dan mayoritas peserta terlewat mendokumentasikan kelengkapan (ST, Materi, Foto/Screenshoot).
5. Realisasi kegiatan pelatihan yang sudah tersedia mata anggarannya belum dapat serta merta dilaksanakan karena menyesuaikan dengan cashflow penerimaan dari BLU.

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan ini adalah

- IP-ASN dihitung dalam lingkup PNS (tidak termasuk PPPK)
- Blokir Anggaran mengakibatkan realisasi pelaksanaan peningkatan kompetensi personil tertunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan
- Optimalisasi Realisasi Kegiatan yang tersedia menunggu ketersediaan Anggaran dari Pendapatan BLU
- Realisasi Fasilitas Pelatihan masih belum sesuai dengan rencana usulan karena batasan ketersediaan kuota & anggaran untuk PKN, PKA & Diklat Fungsional
- Terdapat beberapa realisasi pelatihan teknis diluar rencana, akibat perubahan regulasi, hasil audit & kebutuhan jasa layanan baru.

- Peningkatan pendidikan untuk pegawai yang selesai tugas belajar dapat diakomodir bertahap melalui Pencantuman Gelar & Ujian Penyesuaian Ijazah.

Tindak lanjut triwulan selanjutnya adalah berkoordinasi dengan manajemen dan tim kerja terkait persetujuan realisasi pelatihan yang diusulkan tahun 2026, monitoring ketersediaan anggaran untuk diklat berbayar, koordinasi lebih lanjut dengan penyelenggara PKN & PKA, mengoptimalkan Inhouse Training dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi, mengevaluasi capaian peningkatan kompetensi pegawai yang telah diklat dan mensimulasi progress perhitungan IP-ASN yang telah dicapai.

E. Sasaran Kegiatan 4 : Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik

Tabel 18. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 4 Triwulan II TA 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan sampai Triwulan II	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	40 Persen	40 Persen	100%	50	60	1] Mendesain alur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKJI. 2] Pengembangan Sistem Informasi. 3] Penyusunan SOP	B4: Penyesuaian integrasi data SINDI ke SIPPT sesuai perubahan spesifikasi API V.13 B5: Implementasi SIPPT B6: Implementasi SIPPT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan sampai Triwulan II	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
								Penggunaan Sistem	
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	78 Persen	20 Persen	25,64 Persen	50	48	1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas.	B4 Menyusun dokumen analisis kebutuhan B5 Menyeragamkan format dokumen sesuai standart SPBE B6 Konsultansi review lanjutan dengan Pusdatin tanggal 17 dan 26 Juni 2026.
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.64 indeks	-	-	50	50	1] Pengembangan/ pematkhiran SINDIi. 2] Update website secara berkala 3] Update medsos secara berkala dan setiap saat.	B4-6 : - Pematkhiran konten SIPP dan website -meninjau relevansi bukti dukung - memelihara penyampai

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan sampai Triwulan II	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
								4] Pemutakhiran sistem informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat.	an kehumasan tersampaikan ke pelanggan
								5] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan public.	
								6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggara an podcast OASIS	

Sasaran Kegiatan 4 mempunyai tiga Indikator Kinerja Sasaran yaitu

1) Indikator Kinerja Sasaran 4.1 : Persentase Jenis Layanan Yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI.

Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu yang terintegrasi merupakan suatu kebutuhan bagi BSKJI karena saat ini setiap Satker yang memiliki pelayanan publik menggunakan *platform* yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pimpinan dan stakeholder

terkait dalam mengakses informasi layanan publik yang telah diberikan oleh setiap Satker.

Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan inovasi. Oleh karena itu, BSKJI menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem pada UPT dimana sistem ini dapat memberikan data terbaru terkait layanan yang diberikan oleh UPT di lingkungan BSKJI.

Catatan:

Secara akumulatif, pada tahun 2025 target integrasi layanan pengujian, bertambah di tahun 2026 layanan sertifikasi, 2027 layanan kalibrasi, 2028 layanan bimbingan dan pendampingan teknis, 2029 layanan konsultasi.

Menghitung jumlah jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.

%Jenis layanan yang terintegrasi = Jumlah jenis layanan yang terintegrasi pada tahun ke-n (Z) $\times$ 100%

Contoh 1:

Tahun 2025 layanan yang akan diintegrasikan adalah pengujian (A) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) sehingga

$$\% \text{ Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{1}{5} \times 100 = 20\%$$

Contoh 2:

Tahun 2026 layanan yang akan diintegrasikan adalah sertifikasi (B) dan dari hasil evaluasi di akhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan (A) dan layanan (B) sehingga

$$\% \text{ Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$$

Contoh 3:

Tahun 2027 layanan yang akan diintegrasikan adalah kalibrasi (C) dan dari hasil evaluasi di akhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut belum melakukan integrasi untuk layanan kalibrasi (C), namun telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) dan layanan sertifikasi (B) sehingga

$$\% \text{ Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$$

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan II TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 40% dari target 40% dengan capaian 100%. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 50% dengan realisasi 60%.

Adapun rencana kegiatan triwulan II adalah

1. Mendesain alur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKJI.
2. Pengembangan Sistem Informasi.
3. Penyusunan SOP Penggunaan Sistem

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

1. Bulan April

- 1] Melakukan penyesuaian integrasi data SINDI ke SIPPT sesuai perubahan spesifikasi API V.13
- 2] Mengimplementasikan pengiriman data SIPPT dengan atribut jenis klasifikasi pada data layanan pengujian dan kalibrasi sesuai ketentuan API terbaru.
- 3] Melakukan monitoring harian terhadap kesesuaian data yang terkirim ke SIPPT dengan data yang tampil pada dashboard pimpinan BSKJI.

2. Bulan Mei

- 1] Menambahkan atribut tanggal pengesahan pada data transaksi yang terkirim ke SIPPT dari modul PNBPK SINDI.

2] Koordinasi dengan Pokja Keuangan terkait keselarasan data yang direkap dari rekening koran dengan data transaksi SINDI yang akan dikirim ke SIPPT BSKJI.

3. Bulan Juni

1] Mengoptimalkan mekanisme penjadwalan sinkronisasi data harian pada jam beban server rendah sesuai anjuran Ses. BSKJI untuk meningkatkan stabilitas pengiriman data.

2] Melakukan pengiriman data Proyeksi Penerimaan Tahun 2026 ke SIPPT sesuai daftar layanan resmi BSKJI.

3] Meraih akurasi integrasi data sebesar 100% dibandingkan data penerimaan yang direkap secara manual oleh MyIntress Kementerian Keuangan.

b. Kendala

- Sebagian data keuangan belum memiliki hubungan langsung dengan data layanan sehingga klasifikasi layanan kalibrasi belum dapat dilakukan secara otomatis.
- Belum tersedia mekanisme penghitungan dan pendataan SPM serta SLA yang terintegrasi sehingga tanggal selesai sebagian layanan belum dapat direkap ke SIPPT.

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

- 1] Implementasi perubahan aturan pengiriman data terbaru berhasil diterapkan tanpa mengganggu proses pengiriman data yang sedang berjalan.
- 2] Mekanisme klasifikasi otomatis pada data transaksi layanan pengujian dan kalibrasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan pengiriman data yang telah ditetapkan oleh Ses. BSKJI.
- 3] Implementasi penambahan tanggal pengesahan BLU sebagai pengganti tanggal bayar pada setiap data transaksi yang terkirim dapat berjalan dengan baik.

4] Optimalisasi penjadwalan pengiriman data meningkatkan kestabilan proses pengiriman setiap hari.

Tindak lanjutnya adalah

- 1) Menyempurnakan mekanisme data matching antara data layanan dan data keuangan agar klasifikasi layanan kalibrasi dapat dilakukan secara lebih lengkap.
- 2) Melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk penyusunan dan penerapan SPM/SLA pada setiap jenis layanan sehingga informasi tanggal selesai layanan dapat dikirim ke SIPPT.
- 3) Melaksanakan monitoring berkala terhadap hasil sinkronisasi harian untuk memastikan kualitas dan konsistensi data pada dashboard BSKJI.
- 4) Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan pengelola SIPPT agar setiap perubahan spesifikasi pengiriman data dapat segera diimplementasikan pada sistem integrasi.

2) Indikator Kinerja Sasaran 4.2. : Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tingkat Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi layanan. Penilaian ini mencakup aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, layanan, serta infrastruktur pendukung SPBE di suatu instansi.

Cara menghitungnya adalah memberikan penilaian pada Kertas Kerja Perhitungan Indikator Tingkat Penerapan SPBE, dengan indikator yang dinilai meliputi Tata Kelola SPBE (11 sub indikator), Manajemen SPBE (8 sub indikator), Layanan SPBE (4 sub indikator).

Dari setiap sub indikator yang berjumlah total 23 tersebut, perlu dibuktikan dengan data dukung sesuai kriteria. Masing-masing unit organisasi mengupload data dukung pada Lemon Kemenperin yang disediakan oleh Pusdatin.

a) **Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja**

Pada Triwulan II TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 20% dari target 78% dengan capaian 25,64%. Hasil nilai sesuai perhitungan mandiri dari Kelompok Kerja Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 50% dengan realisasi 48%.

Adapun rencana kegiatan triwulan II adalah

1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang.

2] Melakukan ujicoba implementasi sistem SPBE secara terbatas.

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

Bulan April

- Menyusun dokumen Analisis Kebutuhan untuk pengembangan aplikasi SINDI Resource Management, SINDI BAPC, Udaraku Monitoring Polusi Pelanggan, dan SINDI Optek sebagai tahapan awal siklus pembangunan aplikasi SPBE.
- Menyusun dokumen Perencanaan dan Perancangan/Rancang Bangun sebagai dasar pelaksanaan pengembangan aplikasi sesuai tata kelola SPBE.
- Melaksanakan konsultasi dan review dokumen pengembangan aplikasi bersama Pusdatin Kementerian Perindustrian pada tanggal 28 April 2026.
- Menindaklanjuti hasil review melalui penyempurnaan stakeholder, use case, BPMN/activity diagram, serta kebutuhan fungsional aplikasi.

Bulan Mei

1. Melakukan penyempurnaan dokumen Analisis Kebutuhan, Perencanaan, dan Perancangan berdasarkan hasil konsultasi Pusdatin.

2. Menyeragamkan format dokumen, istilah, stakeholder, dan kebutuhan fungsional agar sesuai dengan standar tata kelola pengembangan aplikasi SPBE.
3. Melakukan koordinasi dengan unit pemilik proses bisnis untuk memastikan seluruh kebutuhan sistem terdokumentasi secara lengkap.
4. Menyiapkan dokumen pengembangan sebagai bahan reviu lanjutan dan bukti dukung Monitoring dan Evaluasi SPBE.

Bulan Juni

- Melaksanakan konsultasi dan reviu lanjutan bersama Pusdatin Kementerian Perindustrian pada tanggal 17 Juni dan 26 Juni 2026.
- Menyempurnakan dokumen pengembangan dengan menambahkan mapping Arsitektur SPBE, penyelarasan arsitektur data, use case, activity diagram, dan kebutuhan fungsional sesuai hasil reviu.
- Menyusun dokumen persetujuan permohonan pengembangan aplikasi yang telah sesuai dengan standar tata kelola pengembangan aplikasi SPBE.
- Menginventarisasi dokumen hasil konsultasi dan reviu sebagai bukti dukung pemenuhan LKE SPBE pada aspek siklus pembangunan aplikasi, reviu pembangunan aplikasi, konsultasi kepada Pusdatin, dan reviu Arsitektur SPBE.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

- Dokumen pengembangan mengalami beberapa kali revisi karena adanya penyempurnaan standar, template, dan ketentuan dokumentasi dari Pusdatin.
- Masih diperlukan penyelarasan istilah, stakeholder, kebutuhan fungsional, *use case*, *activity diagram*, serta BPMN agar seluruh dokumen konsisten.
- Penyusunan dokumen membutuhkan koordinasi yang intensif dengan pemilik proses bisnis dan Pusdatin untuk memastikan seluruh kebutuhan

sistem terdokumentasi secara lengkap.

- Beberapa dokumen masih memerlukan penyempurnaan pada aspek Arsitektur SPBE dan keterkaitan dengan layanan organisasi agar memenuhi standar evaluasi SPBE.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

1. Tahapan pembangunan aplikasi telah dilaksanakan secara sistematis mulai dari Analisis Kebutuhan, Perencanaan, hingga Perancangan /Rancang Bangun sehingga telah memenuhi siklus pembangunan aplikasi SPBE.
2. Reviu pembangunan aplikasi telah dilaksanakan secara bertahap melalui beberapa sesi konsultasi bersama Pusdatin, sehingga kualitas dokumen meningkat dan semakin sesuai dengan standar pengembangan aplikasi pemerintah.
3. Proses pembangunan aplikasi telah dikonsultasikan secara aktif kepada Pusdatin sehingga setiap masukan dapat diakomodasi sebelum memasuki tahap implementasi aplikasi.
4. Penyempurnaan dokumen berhasil meningkatkan kesesuaian terhadap tata kelola pengembangan aplikasi, termasuk konsistensi kebutuhan fungsional, pemodelan proses bisnis, dan dokumentasi teknis.
5. Integrasi pemetaan Arsitektur SPBE ke dalam dokumen pengembangan memperkuat keselarasan antara rencana pembangunan aplikasi dengan Arsitektur SPBE Kementerian Perindustrian sehingga dokumen layak dijadikan bukti dukung LKE SPBE.

Tindak lanjut triwulan selanjutnya adalah

- Menyelesaikan seluruh revisi dokumen hingga memperoleh persetujuan akhir dari Pusdatin sebagai bukti bahwa proses pembangunan aplikasi telah melalui mekanisme konsultasi dan reviu sesuai tata kelola SPBE.
- Menjadikan dokumen Analisis Kebutuhan, Perencanaan, dan Perancangan/Rancang Bangun yang telah disetujui sebagai dasar

pelaksanaan tahapan pembangunan aplikasi berikutnya sesuai siklus pengembangan aplikasi SPBE.

- Melakukan reviu berkala terhadap dokumen pengembangan apabila terdapat perubahan kebutuhan bisnis, standar dokumentasi, maupun kebijakan Arsitektur SPBE Kementerian Perindustrian.
- Memastikan seluruh dokumen pengembangan memuat keterkaitan dengan Arsitektur SPBE, hasil konsultasi Pusdatin, serta bukti reviu sebagai kelengkapan evidence Monitoring dan Evaluasi SPBE.
- Mengarsipkan seluruh berita acara konsultasi, catatan reviu, dokumen hasil perbaikan, dan dokumen persetujuan sebagai bukti dukung pemenuhan indikator LKE SPBE, khususnya:
 1. Pembangunan aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai siklus pembangunan aplikasi.
 2. Reviu pembangunan aplikasi SPBE telah dilaksanakan.
 3. Proses pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan kepada Pusdatin.
 4. Reviu Arsitektur SPBE Kementerian Perindustrian telah dilaksanakan.

3)Indikator Kinerja Sasaran 4.3. : Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan II TA 2026 belum ada realisasi dari indikator kinerja ini. Dimana penilaian self assessment dilakukan pada akhir tahun anggaran. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %. Adapun rencana kegiatan triwulan II adalah

- 1) Pengembangan/pemutakhiran SINDIi.
 - 2) Update website secara berkala.
 - 3) Update medsos secara berkala dan setiap saat.
 - 4) Pemutakhiran sistem informasi digital terintegrasi secara berkala
memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan.
 - 5) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan public.
 - 6) Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan *podcast* OASIS.
- Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah
- 1) Meninjau relevansi bukti dukung IPP dari tahun sebelumnya
 - 2) Memelihara penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan kepada pelanggan tersampaikan dengan baik dan benar
 - 3) Memutakhirkan konten SIPP dan website
 - 4) Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan melalui semua media di BBSPJPPI (elektronik dan non elektronik)
 - 5) Menindaklanjuti hasil penyampaian dokumen/ informasi kepada pelanggan
 - 6) Melaksanakan webinar sosialisasi Permenperin untuk produk MGS, Garam, dan Pupuk pada tanggal 17 Maret 2026
 - 7) mengikuti sosialisasi penilaian PEKPPP dari BSKJI

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan

b. Kendala

Tidak ada kendala

c. Rekomendasi

Mempersiapkan data dukung terkait penilaian PEKPPP dari BSKJI.

F. Sasaran Kegiatan 5 : Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien

Tabel 19. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 5 Triwulan II TA 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan II	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
1	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	62 Persen	Belum ada jadwal audit kinerja	-	40	40	1] Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja	B 4-6 : Belum tersedia jadwal pelaksanaan audit kinerja pada satker BBSPJPPI
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	73 nilai	Belum ada jadwal penilaian arsip	-	50	50	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW II. 2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal.	B4-6 : Menyelenggarakan tata kelola fisik dan digital pada aplikasi Srikandi Triwulan II

Pada Sasaran Kegiatan 5 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

1) Indikator Kinerja Sasaran 5.1 : Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Pengawasan internal melalui pelaksanaan audit kinerja yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal setiap tahun sebagai wujud kontrol dan pendampingan atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahunnya hasil pengawasan yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan penyelesaian

tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dimaksud.

Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi (SR) dengan rumus : $A = \frac{B+C}{2}$

A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR)

B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1)

C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan.

a. **Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja**

Pada Triwulan II TA 2026 belum ada realisasi dari indikator kinerja ini dikarenakan belum terdapat jadwal audit dari Inspektorat Jenderal III.. Sedangkan Pada target fisik dari indikator ini 40 % dengan realisasi 40 %. Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan II adalah:

1] Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja.

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

Bulan April-Juni

Belum tersedia jadwal pelaksanaan audit kinerja pada satker BBSPJPPI.

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. **Kendala**

Tidak ada kendala.

c. **Tindak Lanjut**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah masih menunggu jadwal pelaksanaan audit kinerja satker BBSPJPPI tahun 2025 dari pihak Inspektorat III.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah

- Updating informasi jadwal pelaksanaan audit kinerja 2025.

- Menginventarisir dan menyiapkan dokumen-dokumen umum yang diperlukan pada saat pelaksanaan audit kinerja.

2)Indikator Kinerja Sasaran 5.2 : Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan).

Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Tiap unit kerja dilakukan penilaian sesuai dengan kategori unitnya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah. Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan II TA 2026 belum ada realisasi dari indikator kinerja ini dikarenakan belum terdapat jadwal penilaian kearsipan. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi capaian sebesar 50 %. Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan II meliputi:

1. Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi

Srikandi sepanjang TW II.

2. Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal.

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan sampai triwulan II yaitu:

1. Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW II, yg meliputi
 - Penciptaan : 108 surat masuk & 327 surat keluar;
 - Pemeliharaan: 236 arsip aktif & 407 arsip inaktif; alih media: 1 arsip Dinamis
 - Penggunaan 15 pelayanan; & Penyusutan: 295 arsip dipindahkan & 202 arsip usul musnah.
2. Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal dg melakukan:
 - Koordinasi bersama Biro Umum sbg pembina, dg ketua tim pokja maupun sesama tim arsip.
 - Melakukan Peningkatan SDM Kearsipan dg mengikuti Pembinaan SDM kearsipan secara online.

Perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

- 1) Ketergantungan pada sistem intranet/intranew masih sangat kuat, sehingga pemanfaatan aplikasi SRIKANDI belum optimal.
- 2) Keterbatasan SDM kearsipan baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis, terutama dalam pengelolaan arsip digital dan alih media.
- 3) Koordinasi lintas unit pengolah belum optimal.
- 4) Masih diperlukan penguatan komitmen unit kerja dalam tertib arsip dan penyampaian data dukung.
- 5) Keterbatasan sarana prasarana untuk mendukung digitalisasi.

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

1] Tata kelola arsip fisik dan digital (Aplikasi SRIKANDI) telah dilaksanakan secara konsisten setiap bulan, namun fluktuasi jumlah penciptaan arsip (terutama surat keluar dan penggunaan SRIKANDI) menunjukkan belum optimalnya konsistensi penggunaan sistem digital.

2] Penggunaan layanan arsip relatif masih rendah dan tidak stabil.

3] Alih media arsip statis masih terbatas jumlahnya, sehingga digitalisasi belum maksimal.

Rencana perbaikan untuk tahun selanjutnya adalah koordinasi ke Biro Umum sebagai UK 1 terkait mengenai kearsipan serta menjajaki ketersediaan pelatihan/Bimtek terkait kearsipan untuk peningkatan kompetensi SDM arsiparis BBSPJPPI.

Tindak lanjut pada triwulan selanjutnya adalah

1.Mengintegrasikan pengelolaan arsip ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk transparansi dan kecepatan akses

2.Menyelenggarakan pelatihan teknis kearsipan secara berkala bagi pengelola arsip.

G. Sasaran Kegiatan 6 : Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Tabel 20. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 6 triwulan II TA 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Fisik (%)		Kegiatan Sampai Triwulan II	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
1	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,45 nilai	84,1 nilai	105,85	60	75	1.Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 TW II). 2.Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP.	B4-B6 : ● Pengumpulan dan pengolahan data kinerja bulanan. ● Pengisian dan pelaporan capaian kinerja melalui aplikasi e-Monev Bappenas. ● Penyusunan dan penyampaian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Fisik (%)		Kegiatan Sampai Triwulan II	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
									laporan PP 39 Triwulan I 2026 sesuai Nota Dinas Kepala BBSPJPPI Nomor 69/BBSPJPPI/PR/V/2026 tanggal 7 April 2026 • Penyampaian Rancangan Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025 pada satker BBSPJPPI sesuai ND Plh. Kepala BBSPJPPI Nomor 83/BBSPJPPI/PR/V/2026 tanggal 25 Mei 2026. • Penyusunan dokumen tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	93,40 nilai	96,24 nilai	103,04	50	50	1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3] Berkoordinasi dengan PPK terkait	B4-B6 : • Melakukan input & validasi realisasi capaian output tahun 2026. • Permintaan usulan kepada Tim Pengelola Keuangan BBSPJPPI terkait penyesuaian Rencana Penarikan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Fisik (%)		Kegiatan Sampai Triwulan II	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
								rencana pelaksanaan kegiatan tiap triwulan. 4] Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.	Dana (RPD) Triwulan III 2026 sesuai ND Kapokja Program dan Pelaporan Nomor 6/BBSPJPP11.1/P R/VI/2026 tanggal 23 Juni 2026
		3.Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75,25 nilai	96 nilai	127,58	50	75	1.Menyusun laporan keuangan tahunan (Audited). 2.Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni. 3.Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU. 4.Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI SPAN bulan April dan Mei tahun berjalan.	● Melakukan penyelesaian TDK dan to do list serta rekonsiliasi SAKTI SPAN ● Menyiapkan dokumen untuk pelaksanaan audit KAP.

Pada Sasaran Kegiatan 6 terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

1) Indikator Kinerja Sasaran 6.1 : Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker

Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5

(lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 88 tahun 2021 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan II TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 84,10 dari target 79,45 nilai dengan capaian 105,85%. Hasil nilai berdasarkan Nota Dinas Inspektur III Nomor 62/IJ-IND.4/PW/III/2026 tanggal 13 Maret 2026. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 60 % dengan realisasi capaian sebesar 75 %.

Adapun rencana kegiatan pada Triwulan II meliputi:

- Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 TW II).
- Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP.

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu :

Bulan April

1. Pengumpulan dan pengolahan data kinerja bulanan
2. Pengisian dan pelaporan capaian kinerja bulan Maret pada aplikasi e-Monev Bappenas
3. Penyusunan dan penyampaian laporan PP 39 Triwulan I 2026 sesuai Nota Dinas Kepala BBSPJPPI Nomor 69/BBSPJPPI/PR/IV/2026 tanggal 7 April 2026 Penyusunan draft Perkin 2026 sesuai dengan indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra BBSPJPPI 2025-2029.

Bulan Mei

1. Pengumpulan dan pengolahan data kinerja bulanan
2. Pengisian dan pelaporan capaian kinerja bulan April pada aplikasi e-Monev Bappenas.
3. Penyampaian Rancangan Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025 pada satker BBSPJPPI sesuai ND Plh. Kepala BBSPJPPI Nomor 83/BBSPJPPI/PR/V/2026 tanggal 25 Mei 2026.
4. Penyusunan dokumen tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025, berupa pelaksanaan review atas pedoman teknis eksisting (SOP Perencanaan, Pengukuran, maupun Pelaporan Kinerja)

Bulan Juni

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data kinerja bulanan
- 2) Pengisian dan pelaporan capaian kinerja bulan Mei pada aplikasi e-Monev Bappenas
- 3) Penyusunan dokumen tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025, meliputi:
 - a. Penyusunan revisi SOP Perencanaan, Pengukuran, maupun Pelaporan Kinerja sesuai hasil review.
 - b. Penyusunan draft Perka BBSPJPPI tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Hukuman Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan BBSPJPPI
- 4) Penyusunan draft laporan PP 39 Triwulan II 2026

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Masih perlu disepakatinya penetapan kriteria penilaian sebagai dasar pemberian penghargaan atas capaian kinerja di lingkungan satker BBSPJPPI.

c. Tindak Lanjut

Evaluasi pelaksanaan kegiatan adalah

- 1) Penyusunan dan penyampaian dokumen akuntabilitas kinerja periode Tw II 2026 telah dilakukan secara tepat waktu.
 - 2) Telah dilakukan penyampaian rancangan tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP secara tepat waktu.
 - 3) Beberapa rekomendasi LHE SAKIP telah ditindaklanjuti sesuai timeline yang disusun dalam rancangan tindak lanjut
- Tindak lanjutnya triwulan selanjutnya adalah
- Penjadwalan pembahasan draft Perka BBSPJPPI tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Hukuman Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan BBSPJPPI dengan seluruh Tim Kerja BBSPJPPI sebelum Perka disahkan.
 - Koordinasi dengan Pokja Organisasi dan SDM terkait pembahasan kesesuaian draft revisi SOP terkait Perencanaan, Pengukuran, maupun Pelaporan Kinerja dengan format SOP-AP berdasarkan ketentuan PermenPAN & RB Nomor 35 Tahun 2012.
 - Melengkapi dokumen tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP sesuai rancangan tindak lanjut yang telah disusun.

2) Indikator Kinerja Sasaran 6.2 : Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA Satker.

Nilai minimal IKPA merupakan ambang batas terendah yang harus dicapai oleh satuan kerja dalam mengelola anggaran negara secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IKPA sendiri digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran berbasis aspek kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Nilai minimal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran mendukung pencapaian output yang optimal serta menghindari potensi penyimpangan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan negara.

Tata cara perhitungan IKPA mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 atau peraturan yang berlaku pada tahun

berjalan.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan II TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 96,24 nilai dari target 93,40 nilai dengan capaian 103,04 % (Data diambil dari MyIntress). Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi capaian sebesar 50 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan II meliputi:

1. Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja
3. Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan.
4. Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

1. Bulan April

- Melakukan input & validasi atas target Capaian Output tahun 2026.
- Melakukan input & validasi atas realisasi Capaian Output Bulan Januari-Maret 2026.

2. Bulan Mei

- Melakukan input & validasi atas realisasi Capaian Output Bulan April 2026.

3. Bulan Juni

- Permintaan usulan kepada Tim Pengelola Keuangan BBSPJPPI terkait penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III 2026 sesuai ND Kapokja Program dan Pelaporan Nomor 6/BBSPJPPI1.1/PR/VI/2026 tanggal 23 Juni 2026.
- Melakukan input & validasi atas realisasi Capaian Output bulan Mei 2026.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

- Pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal perencanaan.
- Masih terdapat belanja yang belum dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan belum tersedianya pos anggaran dalam DIPA.

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Rencana dan realisasi penarikan anggaran untuk belanja barang dan belanja modal masih menunjukkan tingkat deviasi yang cukup tinggi
- Realisasi penyerapan anggaran masih berada di bawah target realisasi yang ditetapkan sd Triwulan II 2026.

Tindak lanjutnya triwulan selanjutnya adalah :

- Koordinasi dengan Tim Pengelola Keuangan terkait usulan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III 2026.
- Memproses usulan revisi pemutakhiran Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA Triwulan III tahun 2026 sebelum batas waktu yang ditentukan.
- Memproses pengajuan usulan revisi dalam rangka pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang belum teralokasi dalam DIPA untuk mendorong realisasi penyerapan anggaran.

3) Indikator Kinerja Sasaran 6.3 : Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan

Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan.

Data hasil penilaian dan analisis laporan keuangan dikeluarkan oleh Biro Keuangan.

<u>Tingkat Satuan Kerja</u> Komponen Penilaian	Bobot (%)
1. Kesesuaian dengan SAP	24%
2. Kecukupan Informasi	53,5%
3. Efektivitas Pengendalian Internal	9%
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan	13,5%
Jumlah	100%

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan II TA 2026 realisasi penilaian Laporan Keuangan 96 Nilai dari target 75,25 Nilai dengan capaian 127,58%. Penilaian berdasarkan Undangan Workshop Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan TA 2025 yang diadakan secara daring pada 1 Juli 2026. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi capaian sebesar 75 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan II meliputi:

- Menyusun laporan keuangan tahunan (Audited)
- Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni
- Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU
- Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN Bulan April dan Mei tahun sebelumnya.

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

Bulan April :

- 1) Melakukan penyelesaian TDK & to do list serta rekonsiliasi SAKTI SPAN transaksi Bulan Januari – Maret 2026.
- 2) Menyiapkan dokumen untuk pelaksanaan Audit KAP.

Bulan Mei :

- 1) Melakukan penyelesaian TDK & to do list serta rekonsiliasi SAKTI SPAN transaksi Bulan April 2026.
- 2) Menyusun Laporan Keuangan Tahun 2025 (Audited).

Bulan Juni :

1. Melakukan penyelesaian TDK & to do list serta rekonsiliasi SAKTI SPAN transaksi Bulan Mei 2026.
2. Pra Workshop Laporan Keuangan Semester I TA 2026 (Unaudited).

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Terdapat transaksi belanja yang belum dapat disahkan, yaitu pembelian kursi kerja dengan nilai di bawah batas kapitalisasi. Berdasarkan ketentuan akuntansi pemerintah, transaksi tersebut seharusnya dibebankan pada akun belanja ekstrakomptabel (akun 52). Namun, pada sistem yang digunakan hanya tersedia akun belanja modal (akun 53), sehingga menyebabkan ketidaksesuaian akun pada daftar transaksi yang masih memerlukan penyelesaian (to do list) untuk periode Juni 2026.

c. Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan verifikasi terhadap nilai per satuan aset sebelum proses pertanggungjawaban belanja dilaksanakan. Verifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian klasifikasi belanja dengan ketentuan batas nilai kapitalisasi aset, sehingga penggunaan akun belanja telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan ketentuan yang berlaku. Ketidaksesuaian dalam penentuan akun berpotensi menghambat proses pengesahan transaksi serta memengaruhi ketepatan penyajian laporan keuangan.

Sebagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut, akan dilakukan revisi anggaran untuk menyediakan akun belanja ekstrakomptabel (akun 52) sehingga transaksi pembelian kursi kerja dengan nilai di bawah batas kapitalisasi dapat dicatat dan disahkan menggunakan akun yang sesuai. Selain itu, akan dilakukan koordinasi dengan unit pengelola keuangan guna memastikan proses penganggaran dan pencatatan transaksi pada periode berikutnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

H.Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri

Tabel 21. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 7 triwulan II TA 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan II	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
1	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81 %	99,61 %	122,98%	50	60	1] Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun. 2] Mengutamakan pembelian produk barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 3] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 4] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN	B 4-6 : 1.Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. 2.Melakukan tagging realisasi TKDN pada aplikasi SAKTI. 3TKDN sampai TW II dr aplikasi SAKTI sebesar 99,61%

Pada Sasaran Kegiatan 7 terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

1) Indikator Kinerja Sasaran 7.1 : Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari pemanfaatan anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini, perhitungan penggunaan produk dalam negeri didasarkan atas realisasi anggaran pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja Pemerintah. Pemakaian akun belanja yang disepakati bersama ada 16 akun meliputi akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 5251112, 5251113, 525115, 522162 dan 526112.

Perhitungan nilai realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri (RP_{3DN}) didapat dari Realisasi anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih dibagi total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.

Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus:

$$RP_{3DN} = \frac{RAP_{3DN}}{TotRA} \times 100\%$$

Ket:

RP3DN: Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kemenperin

RAP3DN: Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN

TotRA: Total Realisasi Anggaran berdasarkan akun terpilih.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan II TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 99,61 % dari target 81 persen dengan capaian 122,98 %. Sedangkan target fisik sebesar 50% dengan realisasi 60%.

Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah sebagai berikut:

- Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

- Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan.
- Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan
- Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN
- Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN.

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut sd Triwulan II yaitu:

- Melakukan pengadaan yang merupakan PDN, seperti : belanja barang, konsumsi rapat, pembayaran listrik, pengujian ke pihak lain, kalibrasi, dan perjalanan dinas
- Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25%
- Mengutamakan pembelian produk dalam negeri untuk Kebutuhan Dasar Perkantoran.
- Melakukan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan mengutamakan bahan material produksi dalam negeri

Berdasarkan monitoring capaian realisasi TKDN BBSPJPPI Triwulan II 2026 berdasarkan data *tagging* realisasi TKDN pada akun terpilih diperoleh data capaian sebesar 99,61 %.

Tabel 22. Rekapitan TKDN dari SAKTI

Total Nilai TKDN	Rp. 2.519.050.698
Total Nilai Pagu	Rp. 2.529.010.328
Rata-rata Nilai % TKDN	99,61 %

Dari data di atas, perbandingan realisasi dan target maka berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

1. Penggunaan langganan lisensi aplikasi video conference yang belum didapatkan dari layanan dalam negeri.
2. Diberlakukan blokir anggaran belanja yang berpotensi memiliki nilai TKDN.
3. Beberapa belanja barang, khususnya untuk bahan kimia, belanja modal (mesin/peralatan) masih didapatkan dari impor.

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

- 1] Telah memetakan potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa.
- 2] Telah diajukan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25%, khususnya belanja modal, sehingga menunggu persetujuan tersebut untuk mulai proses pengadaan tersebut.
- 3] Telah melakukan pengadaan dari akun yang telah ditentukan dengan mengutamakan produk yang memiliki sertifikat TKDN atau PDN.

Tindak lanjut triwulan selanjutnya adalah :

- Melakukan pemetaan barang-barang pengadaan yang memiliki KDN dan sertifikat TKDN melalui website P4DN.
- Tetap melakukan pengadaan dari akun yang telah ditentukan dengan mengutamakan produk yang memiliki sertifikat TKDN atau PDN.

3.1.2 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai DIPA BBSPJPPI TA 2026 sampai dengan Triwulan II 2026, capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan pada Triwulan II TA. 2026 dengan mengacu pada aplikasi SMART Kemenkeu. Capaian realisasi keuangan berdasar pagu efektif sebesar 49,15 % sedangkan target capaian realisasi keuangan satker sesuai usulan masing-masing satker sebesar 47,43%. Sehingga realisasi anggaran telah mencapai target. Untuk

target fisik yang ditetapkan BSKJI adalah 5% lebih tinggi dari usulan realisasi keuangan masing masing satker yaitu 52,43% dengan capaian realisasi fisik TW II sebesar 53,47 %. Sehingga untuk realisasi fisik juga mencapai target. Secara lebih jelas capaian realisasi untuk masing-masing kegiatan sebagaimana berikut

a. Kegiatan I : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

a) Hasil Yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian realisasi fisik dan keuangan pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 23.Kegiatan I realisasi fisik dan keuangan

KRO	RO	Pagu Efektif (Rp)	% Realisasi Keuangan TW II	TV RO	RV RO	Progres	April		Mei		Juni	
							RV RO	Progres	RV RO	Progres	RV RO	Progres
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	101 - Sosialisasi dan Diseminasi	46.933.000	180.000 0,38 %	190 Orang	102 Orang	48	0	8	0	8	0	8
BAD Pelayanan publik kepada industri Prasarana Internal	001 - Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri	5.835.674.000	2.072.600.126 35,52 %	485 industri	212 industri	48 %	27	8	19	8	30	8
	002 - Jasa penyelenggara uji profisiensi	100.484.000	3.000.000 2,99 %	15 industri	11 industri	48 %	9	8	2	8	0	8
	003 - Jasa pelayanan produsen bahan acuan	43.615.000	0	5 industri	-	-	0	0	0	0	0	0
	004 - Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri	1.371.451.000	154.121.539 11,24 %	40 industri	32 industri	48 %	7	8	7	8	4	8
	005 - Jasa pelayanan teknis sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri	476.203.000	158.180.433 33,22 %	220 industri	130 industri	48 %	14	8	17	8	27	8

KRO	RO	Pagu Efektif (Rp)	% Realisasi Keuangan TW II	TV RO	RV RO	Progres	April		Mei		Juni	
							RV RO	Progres	RV RO	Progres	RV RO	Progres
	055 - Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri	181.890.000	10.160.000 5,59 %	8 industri	72 industri	48 %	3	8	2	8	0	8
	057 - Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Pencegahan Pencemaran Industri	240.620.000	29.982.930 12,46 %	9 industri	15 Industri	48 %	4	8	4	8	4	8
	Jasa pelayanan verifikasi	78.912.000	5.972.454 7,57 %	16 industri	21 industri	48 %	6	8	6	8	6	8
	096 - Jasa Pelayanan pemeriksa dan pengujian produk halal	34.038.000	2.156.000 6,33 %	25 industri	11 Industri	48 %	1	8	6	8	4	8
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	001 - Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri	5.528.661.000	2.103.993.654 38,06 %	55 unit	17	37,5 %	0	3	0	3	17	22,5
CBL Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	001 – Gedung Laboratorium/Workshop/Layanan Publik yang Dibangun/Direnovasi	800.000.000	47.707.578 5,96 %	1 unit	-	15,5 %	0	4	0	4	0	7,5
Total	Target Keuangan usulan ke BSKJI 47,43 %	Rp. 14.738.481.000	Realisasi Rp.4.588.054.714 31,13%									

(Sumber : Aplikasi My Intres)

Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri merupakan kegiatan dalam lingkup Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang didalamnya mencakup pelaksanaan/operasional pemberian jasa layanan

kepada masyarakat khususnya industri meliputi penyelenggaraan jasa pelayanan teknis pengujian, pelayanan teknis kalibrasi, pelayanan teknis sertifikasi, pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis, pelayanan verifikasi industri, pelayanan uji profisiensi, pelayanan optimasi pemanfaatan teknologi, produsen bahan acuan, pemeriksaan produk halal, pemeliharaan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian berupa pelaksanaan kegiatan akreditasi/ surveillance/ reakreditasi, pengadaan peralatan fasilitas Laboratorium/ workshop/ layanan, peningkatan kapasitas Gedung laboratorium/ workshop /layanan publik yang dibangun/ direnovasi, Sosialisasi dan diseminasi layanan teknis serta publikasi layanan jasa teknis. Pengalokasian anggaran pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan/operasional layanan seperti diantaranya belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan layanan (sampling, audit sertifikasi, supervisi kerjasama Optek, bimbingan dan pendampingan teknis dan verifikasi industri), belanja jasa (pemeliharaan akreditasi lembaga Penilaian Kesesuaian, biaya kalibrasi peralatan, pengujian Subkon, sewa kendaraan dalam rangka mobilisasi peralatan untuk sampling, transport Limbah B3) serta belanja barang dan barang persediaan (pembelian bahan kimia dan bahan penolong, pengadaan peralatan gelas, perlengkapan sampling, penggantian sparepart peralatan dll). Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri terdiri dari 4 KRO yaitu AEF (Sosialisasi dan Diseminasi) , BAD (Pelayanan Publik kepada industri) , CAH (Sarana Bidang Industri dan Perdagangan) dan CBL (Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan).

- KRO AEF (Sosialisasi dan Diseminasi)

Untuk realisasi keuangan sebesar 0,38% dari pagu efektif masih di bawah target realisasi keuangan.

Terkait target Sosialisasi dan Diseminasi sebanyak 190 orang, sudah terrealisasi 102 orang. Capaian tersebut disaat BBSPJPPI menyelenggarakan Sosialisasi Tata Cara Penggunaan SIINAS untuk Proses Sertifikasi dan Kebijakan Pengaturan Permenperin Wajib Minyak

Goreng Sawit, Pupuk dan Garam Konsumsi Beryodium pada 17 Maret 2026 di Gedung Langit Biru BBSPJPPI.

- KRO BAD (Pelayanan Publik kepada industri)

Pada KRO Pelayanan Publik kepada industri terdiri dari 9 RO. Sampai Triwulan II total realisasi keuangan sebesar 29,13 %, tidak mencapai target keuangan yg diusulkan satker ke eselon I.

Realisasi KRO pada umumnya adalah :

1. Perjalanan dinas semua jasa layanan balai.
 2. Pengadaan bahan kimia dan bahan penolong.
 3. Pembayaran sewa peralatan GCMS
 4. Perjalanan dinas instruktur dalam rangka bimbingan dan pendampingan teknis.
- CAH (Sarana Bidang Industri dan Perdagangan)
Pada KRO Sarana Bidang Industri dan Perdagangan terdiri dari satu RO. Dimana target pengadaan 55 unit dan sudah terrealisasi 17 unit. Dimana realisasi keuangan 38,06% masih dibawah target yang diusulkan satker ke eselon I.
 - CBL (Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan)
Pada KRO Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan terdiri dari satu RO Gedung Laboratorium/ Workshop/ Layanan Publik yang Dibangun/ Direnovasi 1 Unit dan akan diklaim terrealisasi setelah pelaksanaan renovasi berakhir. Realisasi keuangan 5,96% masih dibawah target yang diusulkan satker ke eselon I.

Sampai dengan Triwulan II, realisasi keuangan pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri sebesar 31,13% belum mencapai target keuangan yang telah diusulkan oleh satuan kerja kepada Eselon I.

b) Kendala

1. KRO 6077 AEF Sosialisasi dan Diseminasi

- Pada triwulan II belum tersedia jadwal pelaksanaan pameran dengan tema yang sesuai dengan kompetensi dan lingkup layanan BBSPJPPI.
- Realisasi KRO 6077 AEF ini salah satunya adalah pelaksanaan

Business Gathering yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

2. KRO 6077 BAD Pelayanan Publik Kepada Industri

- Terkait jasa layanan uji profisiensi , saat ini masih berada pada tahap persiapan matriks bahan uji profisiensi sehingga realisasi anggaran masih rendah.
- Realisasi jasa layanan bimbingan dan pendampingan teknis industri, sebagian besar dilakukan secara online sehingga penyerapan anggarannya masih rendah.
- Realisasi jasa layanan produsen bahan acuan belum terrealisasi dikarenakan ketidakstabilan matriks bahan acuan sehingga sampai akhir tahun tidak terrealisasi targetnya. .

3. KRO 6077.CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

- Pemanfaatan saldo kas BLU sebesar Rp3.381.798.000,- yang diterima pada 2 April 2026 dialokasikan untuk belanja modal pengadaan alat. Proses pengadaan diperkirakan memerlukan waktu 3–4 bulan sehingga pelaksanaan pengadaan kemungkinan besar baru dapat direalisasikan pada Triwulan III. Saat ini, proses masih berada pada tahap persiapan dokumen pengadaan alat AAS yang akan dilakukan melalui e-catalog.

4. KRO 6077.CBL Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan

- Realisasi anggaran sebesar Rp800.000.000,- yang dialokasikan untuk peningkatan kapasitas ruang laboratorium pengujian masih dalam tahap persiapan dokumen pengadaan. Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

c) Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, beberapa rencana belanja modal sarana dan prasarana layanan memerlukan penyesuaian dan penjadwalan ulang terkait proses pengadaan. Hal tersebut disebabkan oleh pertimbangan ketersediaan anggaran serta penentuan prioritas kebutuhan yang harus disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan kegiatan dan dukungan pendanaan yang bersumber dari PNB/BLU.

Sebagai upaya perbaikan pada triwulan berikutnya, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mencari informasi terkait jadwal pelaksanaan pameran yang sesuai dengan tema dan target pasar layanan BBSPJPPI guna mendukung optimalisasi promosi layanan;
2. Melaksanakan proses pengadaan sesuai jadwal yang telah disesuaikan, termasuk penyiapan dokumen pengadaan dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran serta ketentuan pengelolaan keuangan BLU;
3. Menyiapkan dokumen teknis renovasi peningkatan kapasitas ruang laboratorium sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan, guna mendukung peningkatan kapasitas layanan BBSPJPPI.

b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri

a. Hasil Yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian realisasi fisik dan keuangan pada Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 24 : Kegiatan II Realisasi Fisik dan Keuangan

KRO	RO	Pagu Efektif (Rp)	% Realisasi Keuangan s/d Juni	TVR O	RVR O	Progres	April		Mei		Juni	
							RV RO	Progres	RV RO	Progres	RV RO	Progres
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001-Pengadaan perangkat TIK	166.432.000	159.850.000 96,05%	9 Unit	8 Unit	89 %	0	3	0	8	8	69

EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	246.156. 000	21.82 6.990 8,87%	1 layan an	- Capaian di akhir tahun	48%	0	8%	0	8%	0	8%
	962 - Layanan Umum	182.262. 000	61.91 5.690 33,97 %	1 layan an	- Capaian di akhir tahun	48%	0	8%	0	8%	0	8%
	994 - Layanan Perkantoran	23.636.3 23.000	14.09 6.299. 158 59,64 %	1 layan an	- Capaian di akhir tahun	48%	0	8%	0	8%	0	8%
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	1.050.04 5.000	802.0 22.92 0 76,38 %	61 unit	36 unit	81%	3	8%	24	8%	8	8%
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	51.338.0 00	20.89 2.578 40,7%	104 layan an	54 layan an	48%	9	8%	9	8%	9	8%
	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan	182.621. 000	17.11 0.000 9,37%	1 layan an	- Capaian di akhir tahun -	48%	-	8%	-	8%	-	8%
EBD Layanan Manajemen Kinerja	952 - Layanan Kinerja Satker	120.600. 000	83.47 3.613 69,22 %	1 layan an	- Capaian di akhir tahun	48%	-	8%	-	8%	-	8%

Internal Industri	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	13.816.000	8.264.481,59,82 %	5 dokumen	3 dokumen	48%	2	8%	-	8%	-	8%
	961 - Layanan Reformasi Kinerja	18.452.000	-	2 dokumen	-	48%	-	8%	-	8%	-	8%
Total	Target Keuangan 47,43 %	25.668.045.000		15.273.356.108 59,50 %								

(Sumber Aplikasi My Intres)

Sampai dengan Triwulan II total realisasi keuangan kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri sebesar 59,50 % di atas dari target keuangan usulan satker ke eselon I.

Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri merupakan kegiatan dalam lingkup Program Dukungan Manajemen yang didalamnya mencakup pengadaan perangkat TIK, pelaksanaan layanan operasional perkantoran dan pemeliharaan sarana prasarana, perencanaan dan monitoring evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan, pengelolaan pelayanan publik, pengembangan sistem informasi serta pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM.

Pengalokasian anggaran pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja keperluan perkantoran, belanja gaji dan honor (operasional satuan kerja, honor output kegiatan, honorarium karyawan kontrak) belanja barang persediaan (pengadaan ATK dan perlengkapan rumah tangga perkantoran), biaya langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet), perjalanan dinas (perjadin pimpinan), belanja pemeliharaan sarpras, belanja jasa (pemeliharaan SMM balai, maintenance jaringan, biaya pelatihan teknis

SDM) serta belanja modal (pengadaan sarpras perkantoran, pengembangan sistem informasi, pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan).

Pada kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri terdapat 5 (lima) Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) yang terdiri dari:

1. KRO 6042.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Realisasi keuangan pada KRO ini sebesar 96,05% diatas capaian keuangan yang diusulkan satker ke eselon I.

2. KRO 6042.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

Pada KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal terdiri dari tiga RO.

Sampai Triwulan II total realisasi keuangan sebesar 58,93 % diatas capaian realisasi keuangan yang diusulkan satker ke eselon I.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah

- Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pimpinan
- Pembayaran biaya langgan listrik, biaya medical check up untuk petugas layanan, biaya langgan air PDAM, pembelian gallon air minum dan pembelian obat-obatan untuk kebutuhan poliklinik.
- Pembayaran gaji, tunjangan kinerja , uang makan ASN.
- Pembayaran jasa outsourcing tenaga keamanan, tenaga kebersihan dan pengemudi
- Pengadaan bahan makanan minuman penambah daya tahan tubuh.
- Pembayaran belanja perawatan aplikasi dan jaringan IT.
- Pembayaran operasional dan pemeliharaan kantor.

3. KRO 6042.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Pada KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal terdiri dari satu RO yaitu layanan sarana internal. Dimana target 61 unit dan terrealisasi 36 unit.

Sampai Triwulan II total realisasi keuangan sebesar 76,38% diatas capaian realisasi keuangan yang diusulkan satker ke eselon I.

Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah realisasi :

- Pengadaan 1 buah mobil operasional pimpinan
- Pengadaan 4 AC
- Pengadaan 1 lemari
- Pengadaan 24 meja kubikel
- Pengadaan 6 kursi

4. KRO 6042.EBC Layanan Manajemen SDM Internal

Pada KRO Layanan Manajemen SDM Internal terdiri dari dua RO.

Sampai Triwulan II total realisasi keuangan sebesar 16,24% dibawah capaian realisasi keuangan yang diusulkan satker ke eselon I.

Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah

- Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian.
- Pelatihan knowledge transfer infrastruktur IT (SINDIi).
- Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Kepabeanan

5. KRO 6042.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

Pada KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal terdiri dari 3 RO.

Sampai Triwulan II total realisasi keuangan sebesar 60,01% diatas capaian realisasi keuangan yang diusulkan satker ke eselon I.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah

- Pencetakan dokumen perencanaan dan penganggaran
- Pencetakan dokumen dan penjilidan laporan akuntabilitas kinerja.
- Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi workshop penyusunan Laporan Keuangan dan BMN.
- Audit Laporan Keuangan BLU oleh Kantor Akuntan Publik.

b. Kendala

Realisasi keuangan pada KRO Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Internal yang terdiri atas dua RO sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 masih relatif rendah, yaitu sebesar 16,24%. Capaian tersebut belum sesuai dengan target realisasi keuangan yang telah ditetapkan. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan

kegiatan, di mana sebagian besar kegiatan pada KRO ini baru akan direalisasikan pada Triwulan III Tahun 2026. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II masih terbatas pada tahapan awal seperti persiapan administrasi, koordinasi, dan proses perencanaan kegiatan.

Akibatnya, penyerapan anggaran pada Triwulan II belum dapat terealisasi secara optimal dan baru akan meningkat pada Triwulan berikutnya seiring dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dijadwalkan.

Dengan demikian, realisasi keuangan pada Triwulan II masih bersifat sementara dan diproyeksikan meningkat signifikan pada Triwulan III sejalan dengan pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah direncanakan.

c. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari efisiensi anggaran, direkomendasikan melakukan evaluasi ulang terhadap skala prioritas pengadaan dengan mengutamakan kebutuhan yang mendukung layanan inti dan operasional BBSPJPPI. Penggunaan aset yang telah tersedia juga perlu dioptimalkan, baik melalui rotasi internal antar unit maupun peningkatan intensitas pemakaian guna memperpanjang masa pakai. Sebagai langkah antisipatif, dilakukan pemetaan terhadap barang-barang pengadaan yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negari (TKDN) dan tidak termasuk dalam pemblokiran dengan memanfaatkan data pada portal P4DN. Pengadaan belanja modal tetap dapat dilakukan sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Perindustrian atau Sekretaris Jenderal, guna memastikan seluruh proses tetap sesuai ketentuan dan mendukung kelangsungan operasional prioritas BBSPJPPI.

Terkait dengan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM, segera dilakukan realisasi pelaksanaan pelatihan teknis sesuai dengan daftar dan jadwal pelatihan yang telah disusun sesuai alokasi anggaran yang telah tersedia.

3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

- a. Terkait dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai *Net Promoter Score* (NPS) terdapat kendala masih rendahnya partisipasi pelanggan dalam pengisian kuesioner (pengisian dan pengembalian kuesioner oleh pelanggan jumlahnya rendah dibanding jumlah kuesioner yang disebar).
- b. Terkait indikator kinerja Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri ; indeks peningkatan PNPB dan jumlah hasil layanan jasa industri terkendala adanya persaingan dari kompetitor layanan sejenis dengan harga yang lebih terjangkau.
- c. Terkait indikator kinerja persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA) terdapat kendala belum tersedianya sistem untuk memonitoring penyelesaian pekerjaan untuk seluruh layanan. Dimana proses kalkulasi perhitungan masih dilakukan secara manual sehingga rawan terjadi *human error*.
- d. Terkait indikator Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) terdapat kendala beberapa jabatan fungsional memiliki kuota terbatas dan berbayar sehingga ada ketergantungan dengan penyelenggara (instansi pembina) & ketersediaan anggaran.
- e. Terkait persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dalam sistem informasi BSKJI terkendala sebagian data keuangan belum memiliki hubungan langsung dengan data layanan sehingga klasifikasi layanan kalibrasi belum dapat dilakukan secara otomatis. Serta belum tersedia mekanisme penghitungan dan pendataan SPM serta SLA yang terintegrasi sehingga tanggal selesai sebagian layanan belum dapat direkap ke SIPPT.
- f. Terkait dengan indikator tingkat penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) terdapat kendala dimana beberapa dokumen masih memerlukan penyempurnaan pada aspek Arsitektur SPBE dan keterkaitan dengan layanan organisasi agar memenuhi standar evaluasi SPBE

- g. Terkait dengan sasaran kegiatan tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan indikator nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) terdapat kendala yaitu ketergantungan pada sistem intranet/intranew sehingga pemanfaatan aplikasi SRIKANDI belum optimal.
- h. Terkait indikator kinerja Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker terdapat kendala masih perlu disepakatinya penetapan kriteria penilaian sebagai dasar pemberian penghargaan atas capaian kinerja di lingkungan satker BBSPJPPI.
- i. Terkait indikator kinerja nilai minimal indikator kinerja pelaksanaan anggaran terdapat kendala masih terdapat belanja yang belum dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan belum tersedianya pos anggaran dalam DIPA sehingga berdampak pada tingkat penyerapan anggaran
- j. Terkait indikator kinerja penilaian dan analisis laporan keuangan terdapat kendala terkait belanja yang belum disahkan berupa pembelian kursi kerja dibawah nilai kapitalisasi yang seharusnya masuk pada akun belanja ekstrakomtabel (52) tetapi akun yang tersedia adalah belanja modal (53) sehingga terdapat ketidaksesuaian akun pada *to do list* transaksi bulan Juni 2026
- k. Terkait dengan indikator persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah terdapat kendala dimana penggunaan langganan lisensi aplikasi *video conference* yang belum didapatkan dari layanan dalam negeri dan keterbatasan belanja bahan kimia dan mesin/peralatan laboratorium yang didapatkan dari produsen dalam negeri, masih adanya blokir anggaran belanja modal yang berpotensi memiliki nilai TKDN serta penambahan saldo dari komitmen dengan PPK BLU sebagian besar merupakan belanja modal, namun tidak masuk dalam tagging PDN.

3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

Dalam pelaksanaan pelaporan capaian output kegiatan Triwulan II TA 2026 masih terdapat beberapa kendala antara lain :

Sampai akhir Triwulan II TA 2026 pembaharuan aplikasi ALKI dan PP 39 yang dapat menunjukkan capaian target keuangan dan fisik per KRO belum dapat difungsikan, sehingga belum dapat diperoleh data perbandingan antara target dengan capaian/realisasi keuangan maupun fisiknya sebagai bahan dalam penyusunan laporan kinerja. Pada penyusunan laporan Triwulan, data realisasi fisik diperoleh dari manual perhitungan sedangkan realisasi keuangan berasal dari data pada sistem SAKTI.

a. Kegiatan I : Pengembangan dan Penyelenggara Jasa Industri (6077)

- Terkait KRO 6077 AEF Sosialisasi dan Diseminasi

- Pada Triwulan II belum tersedia jadwal pelaksanaan pameran dengan tema yang sesuai dengan kompetensi dan lingkup layanan BBSPJPPI.
- Realisasi KRO 6077 AEF ini salah satunya adalah pelaksanaan *Business Gathering* yang sesuai perencanaan baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

- KRO 6077 BAD Pelayanan Publik Kepada Industri

- Terkait jasa layanan uji profisiensi , saat ini masih berada pada tahap persiapan matriks bahan uji profisiensi sehingga realisasi anggaran masih rendah.
- Realisasi jasa layanan bimbingan dan pendampingan teknis industri, sebagian besar dilakukan secara online sehingga penyerapan anggarannya masih rendah.
- Belum terrealisasinya jasa layanan produsen bahan acuan dikarenakan adanya kendala ketidakstabilan matriks bahan acuan sehingga berdampak pada realisasi rencana pengembangan layanan PBA BBSPJPPI

- KRO 6077.CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

- Pemanfaatan saldo kas BLU sebesar Rp3.381.798.000,- yang diterima pada 2 April 2026 dialokasikan untuk belanja modal pengadaan alat. Proses pengadaan diperkirakan memerlukan waktu 3–4 bulan sehingga pelaksanaan pengadaan kemungkinan besar baru dapat direalisasikan pada Triwulan III. Saat ini, proses masih berada pada tahap persiapan

dokumen pengadaan AAS di lingkungan UKPBJ.

- KRO 6077.CBL Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan

- Realisasi anggaran sebesar Rp800.000.000,- yang dialokasikan untuk peningkatan kapasitas ruang laboratorium pengujian masih dalam tahap persiapan dokumen pengadaan. Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang
Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (6042)

- KRO Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Internal

- Rendahnya realisasi keuangan disebabkan adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan serta terkait penerimaan BLU satker karena menggunakan sumber pendanaan BLU, di mana sebagian besar kegiatan pada KRO ini baru akan direalisasikan pada Triwulan III Tahun 2026. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II masih terbatas pada tahapan awal seperti persiapan administrasi, koordinasi, dan proses perencanaan kegiatan.

3.3 LANGKAH TINDAK LANJUT

3.3.1 Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Rencana perbaikan dalam pelaksanaan perjanjian kinerja Triwulan II TA 2026 selanjutnya sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan tingkat pengembalian kuesioner pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan *Net Promoter Score* (NPS), diperlukan strategi intensif dalam menghimpun isian kuesioner. Strategi tersebut antara lain dengan akan dilakukannya *blasting* kuesioner ulang ditengah bulan melalui nomor pemasaran. Selain itu pada sistem SINDI akan dilakukan penyetingan agar pelanggan diwajibkan untuk melakukan pengisian kuesioner sebelum dapat mengunduh LHU.
2. Dalam rangka pencapaian target jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri dan jumlah hasil

- layanan jasa industri akan dilakukan dengan cara meningkatkan promosi dan kualitas layanan serta memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi.
3. Terkait perhitungan persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* akan dilakukan pengulangan verifikasi data kepada masing-masing tim untuk memitigasi terjadinya *human error*.
 4. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja IP ASN khususnya terkait pemenuhan kompetensi SDM internal, akan dilakukan melalui pelaksanaan *Inhouse Training* dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi dengan mengoptimalkan anggaran pelatihan hasil rekomposisi blokir. Dalam rangka memonitoring capaian, akan dilakukan simulasi progress perhitungan capaian IP-ASN secara berkala.
 5. Terkait persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI akan dilakukan melakukan koordinasi berkelanjutan dengan pengelola SIPPT agar setiap perubahan spesifikasi pengiriman data dapat segera diimplementasikan pada sistem integrasi.
 6. Untuk pemenuhan evaluasi tingkat penerapan SPBE akan dilakukan pengarsipan seluruh berita acara konsultasi, catatan revidi, dokumen hasil perbaikan, dan dokumen persetujuan sebagai bukti dukung pemenuhan indikator LKE SPBE, khususnya: Pembangunan aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai siklus pembangunan aplikasi ; revidi pembangunan aplikasi SPBE telah dilaksanakan; proses pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan kepada Pusdatin serta revidi Arsitektur SPBE Kementerian Perindustrian telah dilaksanakan.
 7. Dalam rangka persiapan penilaian pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) akan dilakukan proses pengintegrasian pengelolaan arsip ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk transparansi dan kecepatan akses. Selain itu akan diujicobakan pelatihan/Bimtek terkait kearsipan untuk peningkatan kompetensi SDM arsiparis BBSPJPPI
 8. Terkait tindak lanjut rekomendasi SAKIP berkenaan dengan pembahasan draft Perka BBSPJPPI tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Hukuman Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan BBSPJPPI perlu dilakukan rapat dengan seluruh Tim Kerja BBSPJPPI sebelum Perka disahkan.

9. Untuk mendorong capaian nilai IKPA terkait aspek perencanaan penganggaran akan dilakukan koordinasi antara Tim Pokja Program dengan Tim Pengelola Keuangan terkait usulan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III 2026. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Tw III 2026 sebelum batas waktu yang ditentukan.
10. Terkait penilaian dan analisis Laporan Keuangan perlu dilakukam proses revisi anggaran guna memunculkan akun belanja ekstrakomtabel sehingga belanja pembelian kursi kerja yang sudah direalisasi dapat disahkan tanpa ketidaksesuaian akun.
11. Untuk mendukung tingkat penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa di tahun berjalan, akan dilakukan pemetaan barang-barang pengadaan yang telah memiliki KDN dan sertifikat TKDN melalui website P4DN. Optimalisasi anggaran melalui pengajuan revisi untuk produk mesin/peralatan yang sudah discontinued ke mesin/peralatan yang telah memiliki sertifikat TKDN atau PDN.

3.3.2 Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

Rencana perbaikan dalam pelaksanaan kinerja kegiatan Triwulan II TA 2026 sebagai berikut :

- Pencarian informasi terkait jadwal pelaksanaan pameran dengan tema dan target pasar yang sesuai dengan lingkup layanan BBSPJPPI.
- Terkait anggaran jasa layanan produsen bahan acuan yang berpotensi tidak terealisasi, akan dilakukan revisi realokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan layanan lainnya.
- Terkait anggaran belanja modal yang bersumber anggaran PNBPU BLU, proses pengadaan akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi cash flow berdasarkan realisasi penerimaan BLU.
- Terkait peningkatan kompetensi personil, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara .

BAB. IV

P E N U T U P

3.1 Realisasi Kegiatan

Berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan sd Triwulan II Tahun 2026, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang telah tercapai yakni “Nilai Mininal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker” dengan nilai capaian sebesar 84,10 dari target sebesar 79,45 (capaian realisasi kinerja sebesar 105,8 %) serta “Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan” dengan nilai capaian sebesar 96 nilai dari target sebesar 75,25 nilai (capaian realisasi kinerja sebesar 127,58 %). Sementara itu, indikator kinerja lainnya masih belum sepenuhnya mencapai target karena kegiatan masih berjalan hingga akhir tahun 2026.

Dari sisi pelaksanaan anggaran, pada Triwulan II tahun 2026 telah dilakukan 5 (lima) kali proses revisi anggaran dengan jumlah pagu pada DIPA sesuai hasil revisi terakhir sebesar Rp 44.740.652.000, terdiri dari anggaran Rupiah Murni senilai Rp 20.271.892.000 dan anggaran PNPB tahun berjalan sebesar Rp. 24.468.760.000,-. Dengan adanya blokir Kode A dalam rangka Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 sebesar Rp. 4.334.126.000, maka besaran pagu efektif yang tersedia sebesar Rp. 40.406.526.000 terdiri dari anggaran Rupiah Murni Rp. 20.271.892.000,- dan anggaran PNPB sebesar Rp. 20.134.634.000,-.

Dari sisi kinerja layanan jasa teknis, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Triwulan II tercapai sebesar Rp. 8.376.976.815,- atau 39,23% dari target Rp. 21.351.876.000,-. Capaian tersebut berdasarkan pemberian layanan kepada 532 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi dengan keluaran sebanyak 3.720 Hasil Layanan.

Adapun dari aspek kinerja penyerapan anggaran, realisasi anggaran BBSPJPPI sd Triwulan II Tahun 2026 mencapai Rp 19.859.710.144,- atau 49,15% dari total pagu efektif anggaran DIPA revisi terakhir. Capaian penyerapan anggaran tersebut melampaui target realisasi keuangan yang telah disampaikan ke BSKJI yang ditetapkan sebesar 47,43%. Sedangkan capaian realisasi fisik Triwulan II 2026 sebesar 53,47% (sesuai data perhitungan dari capaian % fisik di dalam realisasi

rencana aksi Triwulan II) diatas target realisasi fisik Triwulan II sebesar 52,43% (BSKJI menetapkan target realisasi fisik 5% lebih tinggi dari usulan target realisasi keuangan yang disampaikan satker).

3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Selama pelaksanaan Program/Kegiatan BBSPJPPI sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026, secara umum kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran, antara lain sebagai berikut:

1. Partisipasi pelanggan dalam pengisian Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), dan Net Promoter Score (NPS) masih relatif rendah sehingga proses pengumpulan data survei belum optimal.
2. Persaingan dengan laboratorium dan penyedia jasa sejenis yang menawarkan tarif layanan lebih kompetitif menyebabkan pertumbuhan jumlah pelanggan pada beberapa jenis layanan belum optimal.
3. Beberapa layanan baru, seperti penyelenggara uji profisiensi, pemeriksaan produk halal, verifikasi TKDN, dan layanan optimalisasi teknologi industri masih memerlukan penguatan promosi serta peningkatan pemahaman calon pelanggan terhadap kompetensi BBSPJPPI.
4. Proses pengadaan belanja modal yang bersumber dari dana BLU dan dilaksanakan melalui UKPBJ memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga sebagian realisasi anggaran baru dapat dilaksanakan pada Triwulan III.
5. Belum seluruh sistem informasi pendukung terintegrasi secara optimal, sehingga beberapa proses monitoring, pelaporan, dan pengukuran indikator kinerja masih dilakukan secara manual.
6. Pelaksanaan beberapa kegiatan pengembangan kompetensi SDM harus menyesuaikan jadwal penyelenggara pelatihan serta ketersediaan anggaran, sehingga realisasinya mengalami penyesuaian.
7. Sebagian data keuangan belum memiliki hubungan langsung dengan data layanan sehingga klasifikasi layanan kalibrasi belum dapat dilakukan secara otomatis.

8. Belum tersedia mekanisme penghitungan dan pendataan SPM serta SLA yang terintegrasi sehingga tanggal selesai sebagian layanan belum dapat direkap ke SIPPT.

Meskipun terdapat berbagai kendala tersebut, BBSPJPPI terus melakukan langkah-langkah perbaikan melalui penguatan koordinasi internal, peningkatan promosi layanan, percepatan proses pengadaan, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar target kinerja dan target penyerapan anggaran pada Triwulan berikutnya dapat tercapai secara optimal.

3.3 Saran dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan BBSPJPPI sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026, secara umum pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana dan menunjukkan capaian yang baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar target kinerja dan target penyerapan anggaran pada akhir tahun dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan beberapa tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan promosi dan publikasi layanan BBSPJPPI secara lebih intensif melalui media digital, media sosial, website, seminar, webinar, pameran, serta kerja sama dengan asosiasi industri dan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan calon pelanggan.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Industri (SINDII) dan sistem informasi lainnya agar mendukung proses pelayanan, pengumpulan data pelanggan, pelaksanaan survei IKM, IPAK, dan NPS, serta monitoring capaian kinerja secara lebih efektif dan terintegrasi.
3. Memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui kegiatan *customer engagement*, monitoring kepuasan pelanggan, serta tindak lanjut terhadap masukan dan pengaduan sebagai upaya meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap layanan BBSPJPPI.
4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya belanja modal dan pengadaan peralatan laboratorium, melalui penguatan

- koordinasi dengan UKPBJ dan seluruh pihak terkait agar tidak menghambat pencapaian target fisik maupun penyerapan anggaran.
5. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta *transfer knowledge* guna mendukung pengembangan layanan baru dan peningkatan kualitas pelayanan.
 6. Mengoptimalkan pengembangan layanan jasa baru, antara lain layanan verifikasi TKDN, pemeriksaan produk halal, penyelenggara uji profisiensi, optimalisasi teknologi industri, dan layanan jasa lainnya, sehingga mampu meningkatkan jumlah pelanggan, penerimaan PNBP/BLU, dan daya saing BBSPJPPI.
 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, indikator kinerja, serta realisasi anggaran secara berkala agar setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan yang tepat.
 8. Meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penguatan integrasi aplikasi dan sistem informasi, digitalisasi proses bisnis, serta optimalisasi pemanfaatan layanan elektronik dalam penyelenggaraan administrasi, pelayanan jasa industri, dan pengelolaan kinerja organisasi. Selain itu, perlu dilakukan penguatan tata kelola SPBE, peningkatan kualitas data, pengembangan interoperabilitas antar aplikasi, serta peningkatan kompetensi SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan pelaksanaan tindak lanjut tersebut diharapkan seluruh target indikator kinerja, target layanan jasa industri, serta target realisasi anggaran BBSPJPPI Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai secara optimal, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan jasa industri, tata kelola organisasi yang akuntabel, serta peningkatan daya saing industri nasional.

LAMPIRAN

RENCANA AKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

Unit Organisasi : BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Target Antara	Triwulan I Rencana Kegiatan	Target Antara	Triwulan II Rencana Kegiatan	Target Antara	Triwulan III Rencana Kegiatan	Target Antara	Triwulan IV Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 indeks	25%	1) Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW I 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW I 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW I.	50%	1) Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW II 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW II 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW II.	75%	1) Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW III 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW III 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW III	100%	1) Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW IV 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW IV 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW IV. 4) Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan.
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	990 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	25%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSJPPI 5) Monitoring dan evaluasi capaian TW I	50%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSJPPI 5) Monitoring dan evaluasi capaian TW II	75%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSJPPI 5) Monitoring dan evaluasi capaian TW III	100%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSJPPI 5) Monitoring dan evaluasi capaian TW IV.
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)	88,50 Persen	25%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW I 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW I. 5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan 6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakkan	50%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW II 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW II. 5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan 6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakkan	75%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW III 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW III. 5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan 6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakkan	100%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW IV. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW IV. 5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan 6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakkan
		2. Nilai Net Promoter Score (NPS)	41 Nilai	25%	1) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW I	50%	1) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW II.	75%	1) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW III.	100%	1) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW IV.
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3 Indeks	25%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSJPPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	50%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSJPPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II.	75%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSJPPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW III.	100%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSJPPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV.
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	8.000 Hasil Layanan	25%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSJPPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	50%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSJPPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II.	75%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSJPPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW III.	100%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSJPPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV.
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14,60 Persen	25%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	50%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	75%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	100%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	60 Persen	25%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	50%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	75%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	100%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
4	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,40 Indeks	25%	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW I.	50%	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW II.	75%	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW III.	100%	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM IV.	Ketua Kelompok Organisasi dan Sumber Daya Manusia (Agung B)	Des-26
5	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJ	40 Persen	25%	1) Presentase dan analisis kebutuhan semua jenis layanan yang relevan untuk integrasi 2) Menganalisis jenis data yang perlu diintegrasikan dengan sistem informasi BSKJ	50%	1) Mendesain alur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKJ. 2) Pengembangan Sistem Informasi 3) Penyusunan SOP Penggunaan Sistem	75%	1) Uji Coba Integrasi Sistem 2) Sosialisasi dan Pelatihan Pengguna Sistem 3) Evaluasi dan Perbaikan Sistem	100%	1) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sistem 2) Penyempurnaan Sistem Berdasarkan Evaluasi 3) Sosialisasi Hasil dan Pencapaian Sistem 4) Monitoring dan evaluasi	Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen)	Des-26
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	78 Persen	25%	1) Pemetaan seluruh infrastruktur yang sudah ada dalam pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik yang dapat diintegrasikan. 2) Melakukan analisis kebutuhan sistem Informasi untuk penerapan SPBE, termasuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan. 3) Menyusun rencana pengembangan dan penerapan SPBE yang mencakup prioritas layanan dan tahap implementasi	50%	1) Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2) Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas	75%	1) Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2) Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas	100%	1) Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2) Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas		
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,64 Indeks	30%	1) Mengevaluasi/mereview nilai IPP Tahun sebelumnya. 2) Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDII. 3) Update standar pelayanan dan pengelolaan Informasi publik (Banner/leaflet, website) secara berkala. 4) Pemutakhiran sistim Informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5) Update dan upload Informasi jasa layanan Balai melalui medsos secara berkala dan setiap saat. 6) Penyebaran Informasi kapasitas layanan melalui media Kemenperin	50%	1) Pengembangan/ pemutakhiran SINDII. 2) Update website secara berkala 3) Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4) Pemutakhiran sistim Informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5) Penyediaan Informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 6) Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASI	75%	1) Pengembangan/ pemutakhiran SINDII. 2) Update website secara berkala 3) Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4) Pemutakhiran sistim Informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 6) Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASI	100%	1) Update website secara berkala 2) Update Medsos secara berkala dan setiap saat 3) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat Informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 4) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 5) Self assesmen standart pelayanan publik untuk mengukur capaian nilai standart layanan publik yang telah dilaksanakan		
6	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	62 Persen	15%	1) Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya 2) Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III	40%	1) Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja	85%	1) Penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja 2) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan audit kinerja dengan Tim Auditor Itjen 3) Penyusunan dan penyampaian rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan 4) Koordinasi penyiapan dan penyampaian dokumen tindak lanjut hasil pengawasan 5) Koordinasi dengan Tim Auditor Itjen untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	100%	1) Koordinasi dengan Setitjen untuk memonitoring penerbitan surat penyelesaian hasil pengawasan	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh AW)	Des-26
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	73 Nilai	25%	1) Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW I. 2) Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal.	50%	1) Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW II. 2) Mempersiapkan pengusulan data dukung dan mengupload di link yang disediakan	75%	1) Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW III. 2) Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta.	100%	1) Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW IV. 2) Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta. 3) Tindak lanjut hasil evaluasi penilaian	Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto)	Des-26

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,45 Nilai	30%	1) Penyusunan dokumen Tapkin 2) Penyusunan dokumen Renkin 3) Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I) 4) Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021 5) Koordinasi pelaksanaan penilaian SAKIP dengan Ses BSKJ dan Tim Itje	60%	1) Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II) 2) Penyalpan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	80%	1) Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw III)	100%	1) Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP)	Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W)	Des-26
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	93,40 Nilai	25%	1) Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan I dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) Pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW I 4) Penyampaian data perjanjian/kontrak dan penyelesaian tagihan SPM LS Kontakual yang didaftarkan dan/ diajukan ke KPPN secara tepat waktu 5) Pelaporan capaian output secara berkala dan tepat waktu.	50%	1) Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4) Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	75%	1) Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan III dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4) Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	100%	1) Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan III dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4) Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam), Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W)	
		3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75,25 Nilai	25%	1) Menyusun laporan keuangan tahunan (Unadited) 2) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan Desember tahun sebelumnya 5) Mendukung pelaksanaan audit Laporan Keuangan tahunan	50%	1) Menyusun laporan keuangan tahunan (Audited) 2) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan April dan Mei tahun berjalan	75%	1) Menyusun laporan keuangan semester I (Unaudited) 2) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan Juni, Juli dan Agustus tahun berjalan 5) Mendukung pelaksanaan penilaian laporan keuangan tahunan (Audited) oleh Biro Keuangan	100%	1) Menyusun laporan keuangan triwulan III (Unaudited) 2) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan September, Oktober, dan November tahun berjalan 5) Mendukung pelaksanaan audit PPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-September tahun berjalan 6) Mendukung pelaksanaan audit BPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-November tahun berjalan	Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam)	Des-26
8	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81 Persen	30%	1) Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan 2) Pengisian aplikasi P3DN 3) Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25% 4) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang bertKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 5) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 6) Rekapitulasi realisasi penggunaan	50%	1) Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun. 2) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang bertKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 3) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 4) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging	75%	1) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang bertKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging	100%	1) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang bertKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto).	Des-26



REALISASI RENCANA AKSI SAMPAI TRIWULAN II TA. 2026
SATKER BBSPPJPI

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II				Kendala	Tindak Lanjut	Jangka Waktu Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
						% Fisik		Rencana	Kegiatan					Realisasi
						Target	Realisasi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68	Persen	3,74	101,63%	50	50	1) Penanganan dan pemantauan complain/kebulan pelanggan TW II 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW II 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW II.	B4 - B6 : Penyebaran kuesioner ke pelanggan dengan jumlah kuesioner yang kembali Triwulan II TA 2026 sebanyak 143 buah dengan nilai 3,74	Belum terintegrasinya penyajian data jumlah dan identitas pelanggan (masih terpisah-pisah pada masing-masing bagian teknis) sehingga tidak semua pelanggan pada semua jasa layanan yang dapat diberikan kuesioner IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Selain itu, sistem SINDII belum mengakomodir keharusan untuk mengisi kuesioner pelanggan sebelum perusahaan mengunggah LHU mandiri	1. Membuat tampilan kuesioner yang lebih menarik, sehingga minat pelanggan untuk mengisi kuesioner semakin meningkat. 2. Optimalisasi platform SINDII sebagai sarana dan prasarana penyampaian dan pengisian kuesioner agar dapat terealisasi dimana pelanggan diharuskan mengisi kuesioner IKM sebelum mengunggah LHU. 3. Penjadwalan sosialisasi penyampaian dan pengisian kuesioner terintegrasi BBSPPJPI dilakukan setiap awal bulan. 4. Membuat dokumen data jumlah dan identitas pelanggan dalam satu pintu (rekapitulasi lengkap, terutama narahubung). Selain itu, dapat pula membuat database melalui SINDII berdasarkan nomor order layanan yang digunakan (nomor order masih dalam tahap pengembangan).	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri.	Triwulan III 2026
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	990	Perusahaan industri/pelaku/ustansi	532	53,74%	50	55	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPPJPI 5) Monitoring dan evaluasi capaian TW II.	B4-B6 : Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi sampai TW II sebanyak 532 perusahaan industri/pelaku usaha/instansi.	- Adanya identifikasi penurunan permintaan layanan pengujian penanganan pencemaran dikarenakan beberapa pelanggan beralih ke laboratorium milik DLH maupun kompetitor yang lebih murah. -Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, audit CEMS, dan penjualan produk AMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan yg optimal	Meningkatkan promosi baik secara online maupun offline (pameran-pameran) , memperluas ruang lingkup layanan jasa yang terakreditasi, menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon, menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik melakukan jasa layanan di BBSPPJPI dan yang tidak kalah penting adalah semua pegawai menjadi agen pemasaran dan promosi bersama saat melakukan jasa layanan	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri.	Triwulan III 2026
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	88,5	Persen	99,39	112,31%	50	50	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW II	B4-B6 : 1.Melakukan penyelesaian semua jenis layanan sesuai SPM. 2.Pemeliharaan peralatan 3.Monitoring dan evaluasi SPM layanan secara berkala. 4.Total sampel Bulan Januari-Juni 3459 sampel. Sedangkan sampel yang sesuai SPM sebanyak 3438 sampel.Sehingga SPM sebesar 99,39 %.	Perhitungan SLA masih manual sehingga rawan human error.	Dilakukan pengulangan verifikasi data kepada masing-masing tim untuk menigitasi terjadinya human error.	Ketua Tim Kerja PJI, Ketua Tim kerja Pengujian Lingkungan dan Instrumen; Ketua Tim Kerja Standardisasi,Sertifikasi,Inspeksi dan Verifikasi Industri ; Ketua Tim Kerja Kalibrasi Lingkungan dan Instrumen, Ketua Tim Kerja Optek.	Triwulan III 2026
		2. Nilai Net Promoter Score (NPS)	41	Nilai	69	168,29%	50	60	1) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW II.	B4 - B6: jumlah responden sampai Maret 2026 sebanyak 143 responden dengan promotor 102 responden, passives 38 pelanggan dan detractors 4 pelanggan	-Tingkat pengembalian kuesioner masih rendah dibanding jumlah kuesioner yang disebar. Belum terintegrasinya penyajian data jumlah dan identitas pelanggan (masih terpisah-pisah pada masing-masing bagian teknis) sehingga tidak semua populasi dapat diberikan survey NPS	Melakukan berbagai strategi untuk menarik minat pelanggan supaya mengisi survey NPS sehingga kuesioner yang diberikan mendapatkan feedback yang kembali ke BBSPPJPI seperti: menargetkan pelanggan yang datang ke BBSPPJPI (mengantar sampel uji) untuk langsung mengisi kuesioner di penerimaan contoh; melakukan blasting WA dan email secara lebih intens dan terjadwal, komunikasi efektif, serta sosialisasi melalui media sosial BBSPPJPI. Platform SINDII bisa digunakan sebagai sarana dan prasarana keharusan pelanggan untuk mengisi survey NPS sebelum mengunggah laporan hasil uji. Untuk pelanggan sertifikasi, verifikasi TKDN, dan PUP, survey NPS diberikan setelah pelaksanaan audit,surveilenn maupun verifikasi	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	Triwulan III 2026
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3	Indeks	-		50	50	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II.	B4: Penerimaan sampai Bulan April 2026 sebesar Rp. 5.846.992.952 (27,4%) dari target Rp. 21.351.876.000.- B5: Penerimaan sampai Bulan Mei 2026 sebesar Rp. 6.910.096.810,- (32,36% dari target). B6: Penerimaan PNBP BBSPPJPI sampai dengan Bulan Juni 2026 sebesar Rp. 8.376.976.815,- (39,23 % dari target)	1.Adanya kompetensi dari kompetitor layanan yang sejenis (adanya himbauan dari DLH kepada industri untuk mengujikan di fasilitas laboratorium yang dimiliki DLH). 2.Adanya kompetensi dari kompetitor layanan sejenis dengan harga yang lebih murah. 3.Ruang lingkup layanan pengujian,kalibrasi,sertifikasi masih terbatas. 4.Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan 5.Proses penagihan untuk kontrak Kerjasama pemantauan lingkungan cukup rumit dan memerlukan waktu yang lama. 6.Masyarakat belum familiar dan terinformasi terkait kompetensi dan lingkup jasa layanan BBSPPJPI dikarenakan masih kurangnya informasi tentang BBSPPJPI	1.Meningkatkan promosi layanan baru BBSPPJPI yang meliputi uji RATA, CGA, CEMS, Uji Profisiensi, Pemeriksaan Halal, TKDN, dan LSP melalui penyusunan portofolio layanan yang komprehensif serta perluasan jejaring kerja (networking) dengan memanfaatkan media sosial resmi baik di keikutsertaan dalam kegiatan pameran. 2.Meningkatkan jumlah ruang lingkup pengujian dan kalibrasi yang terakreditasi dengan harga yang bersaing (dipengaruhi upaya modernisasi peralatan). 3.Mendorong peluang pengembangan jasa layanan baru yang memiliki prospek terhadap peningkatan penerimaan PNBP (kalibrasi AQMS, sertifikasi profesi, verifikasi dan validasi GRK). 4.Mengaitkan jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses bimtek kepada SDM terkait dan memulai untuk persiapan proses akreditasi 5.Mengaitkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBSPPJPI	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri, Kapokja Keuangan dan BMN	Triwulan IV 2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II				Kendala	Tindak Lanjut	Jangka Waktu Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							% Fisik		Kegiatan					
							Target	Realisasi	Rencana	Realisasi				
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	8000	Hasil Layanan	3720	46,50%	50	50	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPP/PI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjaln komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPP/PI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TAW II.	B4-: Jumlah layanan jasa industri April 2026 sebesar 2.237 hasil layanan. B5-: Jumlah layanan jasa industri sampai Mei 2026 sebesar 3.027 hasil layanan B6-: Jumlah layanan jasa industri sampai Juni 2026 sebesar 3.720 hasil layanan	1.Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah 2.Beberapa perusahaan beralih ke lah lain pada jasa layanan pengujian 3.Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN dan penjualan produk AMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan yg optimal. 4.Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPP/PI secara umum khususnya terkait pengembangan layanan baru BBSPP/PI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPP/PI meski beragam promosi telah dilakukan	Meningkatkan promosi baik secara online maupun offline (pameran-pameran) , memperluas ruang lingkup layanan jasa yang terakreditasi, menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon, menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik melakukan jasa layanan di BBSPP/PI dan yang tidak kalah penting adalah semua pegawai menjadi agen pemasaran dan promosi bersama saat melakukan jasa layanan	Ketua Tim Kerja PJI	Triwulan III 2026
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14,6	Persen	6,42	43,97%	50	50	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan.	B4-6 : 1.Melakukan monitoring penerimaan BLU April-Juni 2026 2. Melakukan pertanggungjawaban belanja modal berupa pembelian TIK, perangkat dan mesin, dan modal lainnya April-Juni 2026 3. Updating nilai buku aset satuan kerja Bulan Juni 2026. Dimana Penerimaan Rp 8.376.976.815,- sedangkan aset tetap Rp.130.518.821.559	Pada awal Juli masih terdapat aset yang belum diregister pada Neraca per bulan Juni 2026 mengakibatkan nilai aset belum dapat dihitung dengan tepat.	Dilakukan pendetaltan terhadap pembelian aset yang telah diinput oleh operator komitmen, atau RoA dihitung menggunakan nominal yang tersaji pada Neraca Bulan Juni 2026.	Kabag TU , Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN	Triwulan IV 2026
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	60	Persen	52,71	87,85%	50	50	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional.	B4-B6 : 1.Melakukan monitoring penerimaan BLU Bulan April-Juni 2026. 2.Melakukan pertanggungjawaban belanja pegawai dan belanja barang RM April-Juni 2026 3.Melakukan pengesahan penerimaan dan pengeluaran BLU periode April-Juni 2026 4.Membuat jurnal balik atas transaksi akrual tahun 2025 yang mempengaruhi Laporan Operasional Satker. Dimana pendapatan operasional Rp.8.376.976.815,- sedangkan belanja operasional Rp.15.891.531.469,-	1) Belum dilakukannya input pemakaian transaksi persediaan serta 2) belum dilakukan tutup periode bulan Juni 2026 sehingga pada awal bulan Juli 2026 Laporan Operasional belum dapat merepresentasikan jumlah belanja operasional dengan tepat.	1. Melakukan pendetaltan transaksi persediaan segera setelah operator komitmen menyelesaikan input transaksi pembelian persediaan, sebelum proses pengesahan pada bulan berjalan, sehingga beban persediaan pada Laporan Operasional dapat tersaji lebih akurat meskipun proses penutupan periode belum dilaksanakan. 2. Melakukan perhitungan rasio POBO menggunakan Laporan Operasional yang paling mutakhir sebagai dasar pelaporan sementara, kemudian melakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan setelah proses penutupan periode bulan Juni 2026 selesai dilaksanakan sesuai arahan Biro Keuangan.	Kabag TU , Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN	Triwulan IV 2026
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,4	Indeks	81,4	100,00%	50	50	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 IPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TAW II.	B4- 4-6 : 1.Monitoring kesesuaian usulan rencana pelatihan dan ketersediaan anggaran 2025. 2.Fasilitasi diklat 3.Pembaharuan informasi pendidikan dan pelatihan pegawai.	1.Realisasi PKN belum dapat direncanakan karena pimpinan masih melaksanakan tugas tambahan khusus diluar satker BBSPP/PI 2.Blokir Anggaran tahun 2026 mengakibatkan volume rencana peningkatan kompetensi SDM untuk kebutuhan layanan jasa baru tertunda 3.Beberapa labatan Fungsional memiliki kuota terbatas dan banyak sehingga ada ketergantungan dengan penyelenggara (instansi pembina) & ketersediaan anggaran 4.Untuk Workshop/ Seminar/ Webinar/ Bimtek tidak menerbitkan sertifikat dan mayoritas peserta terlambat mendokumentasikan kelengkapan (ST, Materi, Foto/Screenshoot)	Berkoordinasi dengan manajemen dan tim kerja terkait persetujuan realisasi pelatihan yang diusulkan tahun 2026, monitoring ketersediaan anggaran untuk diklat berbayar, koordinasi lebih lanjut dengan penyelenggara PKN & PKA, mengoptimalkan Inhouse Training dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 IPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi, mengevaluasi capaian peningkatan kompetensi pegawai yang telah diklat dan mensimulasi progress perhitungan IP-ASN yang telah dicapai	Kabag Tata Usaha,Ketua Kelompok Organisasi dan Sumber Daya Manusia.	Triwulan IV 2026
SK.4	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	40	Persen	40	100,00%	50	60	1) Mendesain alur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKJI. 2) Pengembangan Sistem Informasi. 3) Penyusunan SOP Penggunaan Sistem	B4-: Penyesuaian integrasi data SINDI ke SIPPT sesuai perubahan spesifikasi API V.13 B5: Implementasi SIPPT B6: Implementasi SIPPT	● Sebagian data keuangan belum memiliki hubungan langsung dengan data layanan sehingga klasifikasi layanan kalibrasi belum dapat dilakukan secara otomatis. ● Belum tersedia mekanisme penghitungan dan pendataan SPM serta SLA yang terintegrasi sehingga tanggal selesai sebagian layanan belum dapat direkap ke SIPPT.	1) Menyempurnakan mekanisme data matching antara data layanan dan data keuangan agar klasifikasi layanan kalibrasi dapat dilakukan secara lebih lengkap. 2) Melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk penyusunan dan penerapan SPM/SLA pada setiap jenis layanan sehingga informasi tanggal selesai layanan dapat dikirim ke SIPPT. 3) Melaksanakan monitoring berkala terhadap hasil sinkronisasi harian untuk memastikan kualitas dan konsistensi data pada dashboard BSKJI. 4) Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan pengelola SIPPT agar setiap perubahan spesifikasi pengiriman data dapat segera diimplementasikan pada sistem integrasi.	Ketua Tim Kerja PJI, Ketua Kapokja Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital.	Triwulan IV 2026
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	78	Persen	20	25,64%	50	48	1) Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang secara terbatat. 2) Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE	B4 Menyusun dokumen analisis kebutuhan B5 Menyeragamkan format dokumen sesuai standart SPBE B6 Konsultansi reviu lanjutan dengan Pusdatin tanggal 17 dan 26 Juni 2026.	● Dokumen pengembangan mengalami beberapa kali revisi karena adanya penyempurnaan standar template, dan ketentuan dokumentasi dari Pusdatin. ● Masih diperlukan penyiarsaan istilah, stakeholder, kebutuhan fungsional, use case, activity diagram, serta BPMN agar seluruh dokumen konsisten . ● Penyusunan dokumen membutuhkan koordinasi yang intensif dengan pemilik proses bisnis dan Pusdatin untuk memastikan seluruh kebutuhan sistem terdokumentasi secara lengkap. ● Beberapa dokumen masih memerlukan penyempurnaan pada aspek Arsitektur SPBE dan keterkaitan dengan layanan organisasi agar memenuhi standar evaluasi SPBE	-Menyelesaikan seluruh revisi dokumen hingga memperoleh persetujuan akhir dari Pusdatin sebagai bukti bahwa proses pembangunan aplikasi telah melalui mekanisme konsultasi dan reviu sesuai tata kelola SPBE. -Menjadikan dokumen Analisis Kebutuhan, Perencanaan, dan Perancangan/Rancang Bangun yang telah disetujui sebagai dasar pelaksanaan tahapan pembangunan aplikasi berikutnya sesuai siklus pengembangan aplikasi SPBE. -Melakukan reviu berkala terhadap dokumen pengembangan apabila terdapat perubahan kebutuhan bisnis, standar dokumentasi, maupun kebijakan Arsitektur SPBE Kementerian Perindustrian.	Ketua Tim Kerja PJI, Ketua Kapokja Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital.	Triwulan IV 2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II			Kendala	Tindak Lanjut	Jangka Waktu Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
						% Fisik		Kegiatan						
						Target	Realisasi							
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,64	Indeks	Penilaian self assessment di akhir tahun	50	50	1) Pengembangan/ pemutakhiran SINDI. 2) Update website secara berkala 3) Update medsos secara berkala dan setiap saat. 4) Pemutakhiran sistem informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat. 5) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan public. 6) Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS	B4-6 : -Pemutakhiran konten SIPPN dan website -meninjau relevansi bukti dukung -memelihara penyampaian kehumasan tersampaikan ke pelanggan	Tidak ada kendala	Mempersiapkan data dukung terkait penilaian PEKPPP dari BSJKI.	Ketua Tim Kerja PJI	Triwulan III 2026	
SK.5	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	62	Persen	Belum ada jadwal audit	40	40	1) Koordinasi penyitapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja	B 4-6 : Belum tersedia jadwal pelaksanaan audit kinerja pada satker BBSJPPI			Kabag TU ,Ketua Kelompok Kerja Program.	Triwulan II 2026	
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	73	Nilai	Belum ada jadwal audit	50	50	1) Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW II. 2) Mempersiapkan pengusutan data dukung dan pengisian form pengawasan internal.	B4-6 : Menyelenggarakan tata kelola fisik dan digital pada aplikasi Srikandi Triwulan II	1) Ketergantungan pada sistem intranet/intranew masih sangat kuat, sehingga pemanfaatan aplikasi SRIKANDI belum optimal. 2) Keterbatasan SDM kearsipan baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis, terutama dalam pengelolaan arsip digital dan alih media. 3) Koordinasi lintas unit pengolah belum optimal. 4) Masih diperlukan penguatan komitmen unit kerja dalam terbit arsip dan penyampaian data dukung.	1.Mengintegrasikan pengelolaan arsip ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk transparansi dan kecepatan akses 2.Menyelenggarakan pelatihan teknis kearsipan secara berkala bagi pengelola arsip.	Kabag TU ,Ketua Kelompok Kerja Umum	Triwulan II 2026	
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,45	Nilai	84,1	105,85%	60	75	1.Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 TW II). 2.Penyitapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP.	B4-B6 : ● Pengumpulan dan pengolahan data kinerja bulanan. ● Pengisian dan pelaporan capaian kinerja melalui aplikasi e-Monev Bappenas. ● Penyusunan dan penyampaian laporan PP 39 Triwulan I 2026 sesuai Nota Dinas Kepala BBSJPPI Nomor 69/BBSJPPI/PR/IV/2026 tanggal 7 April 2026 ● Penyampaian Rancangan Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025 pada satker BBSJPPI sesuai ND Ph. Kepala BBSJPPI Nomor 83/BBSJPPI/PR/V/2026 tanggal 25 Mei 2026. ● Penyusunan dokumen tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025	Masih perlu disepakatinya penetapan kriteria penilaian sebagai dasar pemberian penghargaan atas capaian kinerja di lingkungan satker BBSJPPI.	B4-6 : -Penjadwalan pembahasan draft Perka BBSJPPI tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Hutuman Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan BBSJPPI dengan seluruh Tim Kerja BBSJPPI sebelum Perka disahkan. -Koordinasi dengan Pokja Organisasi dan SDM terkait pembahasan kesesuaian draft revisi SOP terkait Perencanaan, Pengukuran, maupun Pelaporan Kinerja dengan format SOP-AP berdasarkan ketentuan PermenPAN & RB Nomor 35 Tahun 2012. -Melengkapi dokumen tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP sesuai rancangan tindak lanjut yang telah disusun.	Kabag TU ,Ketua Kelompok Kerja Program	Triwulan II 2026
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	93,4	Nilai	96,24	103,04%	50	50	1) Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) Berkordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan tiap triwulan. 4) Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.	B4-B6 : ● Melakukan input & validasi realisasi capaian output tahun 2026. ● Permintaan usulan kepada Tim Pengelola Keuangan BBSJPPI terkait penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III 2026 sesuai ND Kapokja Program dan Pelaporan Nomor 6/BBSJPPI1.1/PR/VI/2026 tanggal 23 Juni 2026	● Pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal perencanaan. ● Masih terdapat belanja yang belum dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan belum tersedianya pos anggaran dalam DIPA.	B4-6 : ● Koordinasi dengan Tim Pengelola Keuangan terkait usulan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III 2026. ● Memproses usulan revisi pemutakhiran Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA Triwulan III tahun 2026 sebelum batas waktu yang ditentukan. ● Memproses pengajuan usulan revisi dalam rangka pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang belum teralokasi dalam DIPA untuk mendorong realisasi penyerapan anggaran.	Kabag TU ,Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN.	Triwulan IV 2026
		3.Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75,25	Nilai	96	127,57%	50	75	1.Menyusun laporan keuangan tahunan (Audited). 2.Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni. 3.Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU. 4.Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI SPAN bulan April dan Mei tahun berjalan.	B4-B6: ● Melakukan penyelesaian TDK dan to do list serta rekonsiliasi SAKTI SPAN ● Menyiapkan dokumen untuk pelaksanaan audit KAP.			Kabag TU ,Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN.	Triwulan IV 2026
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81	Persen	99,61	122,98%	50	60	1) Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan 2) Pengisian aplikasi P3DN 3) Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pojabhat yang ditujukan untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25% 4) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 5) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 6) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN	B 4-6 : 1.Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. 2.Melakukan tagging realisasi TKDN pada aplikasi SAKTI. 3.TKDN sampai TW II dr aplikasi SAKTI sebesar 99,61%	1.Penggunaan langganan lisensi aplikasi video conference yang belum didapatkan dari layanan dalam negeri. 2.Diberlakukan blokir anggaran belanja yang berpotensi memiliki nilai TKDN. 3.Berapa belanja barang, khususnya untuk bahan kimia, belanja modal (mesin/peralatan) masih didapatkan dari impor.	B4-6 : • Melakukan pemetaan barang-barang pengadaan yang memiliki KDN dan sertifikat TKDN melalui website P4DN. • Tetap melakukan pengadaan dari akun yang telah ditentukan dengan mengutamakan produk yang memiliki sertifikat TKDN atau PDN.	Kabag TU ,Ketua Kelompok Kerja Umum	Triwulan III 2026

3 Juli 2026
Kepala BBSJPPI



Sofyari Rahman

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Blokir A	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
1	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	AEF Sosialisasi dan Diseminasi (orang)	001 Sosialisasi dan Diseminasi (orang)	75.246.000	28.313.000	180.000	190	102	30	Januari: Kegiatan belum dilaksanakan, dan pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Februari: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Maret: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. April: Progres kegiatan sedang berjalan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Mei: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Juni: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -
2	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada Industri (Industri)	001 Jasa Pelayanan Teknis Pengujian (Industri)	7.211.180.000	1.375.506.000	2.072.600.126	485	212	45	Januari: Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Februari: Kegiatan sudah dilaksanakan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Maret: Kegiatan sudah dilaksanakan, dan pertanggungjawaban keuangan sudah dilakukan. April: Progres kegiatan sedang berjalan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Mei: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juni: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -
3	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada Industri (Industri)	002 Jasa Penyelenggara Uji Profisiensi (Industri)	123.360.000	22.876.000	3.000.000	15	11	35	Januari: Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Februari: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Maret: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. April: Progres kegiatan sedang berjalan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Mei: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Juni: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -
4	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada Industri (Industri)	003 Jasa Pelayanan Produsen Bahan Acuan (Industri)	62.430.000	18.815.000	0	5	0	30	Januari: Kegiatan belum dilaksanakan, dan pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Februari: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Maret: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. April: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Mei: Kegiatan belum dilaksanakan dan pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Juni: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -

5	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada Industri (Industri)	004 Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi (Industri)	1.919.918.000	548.467.000	154.121.539	40	32	40	Januari: Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Februari: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Maret: Progres kegiatan sedang berjalan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. April: Progres kegiatan sedang berjalan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Mei: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juni: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -
6	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada Industri (Industri)	005 Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi (Industri)	876.446.000	400.243.000	158.180.433	220	130	32	Januari: Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Februari: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Maret: Progres kegiatan sedang berjalan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. April: Progres kegiatan sedang berjalan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Mei: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juni: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -
7	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada Industri (Industri)	006 Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri (Industri)	373.900.000	192.010.000	10.160.000	8	7	26	Januari: Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Februari: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Maret: Progres kegiatan sedang berjalan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. April: Progres kegiatan sedang berjalan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Mei: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Juni: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -
8	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada Industri (Industri)	008 Jasa Pelayanan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri (Industri)	399.020.000	158.400.000	29.982.930	9	1	30	Januari: Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Februari: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Maret: Progres kegiatan sedang berjalan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. April: Progres kegiatan sedang berjalan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Mei: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juni: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -

9	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri)	009 Jasa Pelayanan Verifikasi (Industri)	157.824.000	78.912.000	5.972.454	16	15	25	Januari: Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Februari: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Maret: Progres kegiatan sedang berjalan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. April: Progres kegiatan sedang berjalan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Mei: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Juni: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -
10	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri)	010 Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal (Industri)	58.636.000	24.598.000	2.156.000	25	11	30	Januari: Kegiatan belum dilaksanakan, dan pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Februari: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Maret: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. April: Progres kegiatan sedang berjalan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Mei: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Juni: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Blokir A	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
11	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan (Unit)	001 Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan (Unit)	5.888.861.000	360.200.000	2.103.993.654	55	17	37,5	Januari: Kegiatan belum dilaksanakan, dan pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Februari: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Maret: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. April: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Mei: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Juni: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -
12	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	CBL Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan (unit)	001 Gedung Laboratorium/Workshop/Layanan Publik yang Dibangun/Direnovasi (unit)	800.000.000	0	47.707.578	1	0	15,5	Januari: - Februari: - Maret: - April: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Mei: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Juni: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -
13	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	001 Pengadaan Perangkat TIK (Unit)	184.926.000	18.494.000	159.850.000	9	8	89	Januari: Kegiatan belum dilaksanakan, dan pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Februari: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Maret: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. April: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Mei: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Juni: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -
14	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	353.202.000	107.046.000	21.826.990	1	0	49,98	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Mei: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Juni: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -

15	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	962 Layanan Umum (Layanan)	353.624.000	171.362.000	61.915.690	1	0	49,98	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Mei: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Juni: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -
16	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	23.964.727.000	328.404.000	12.769.372.067	1	0	54,25	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres kegiatan sedang berjalan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. April: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Mei: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Juni: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -
17	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	951 Layanan Sarana Internal (Unit)	1.094.273.000	44.228.000	802.022.920	61	36	81	Januari: Kegiatan belum dilaksanakan, dan pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Februari: Kegiatan sudah dilaksanakan, dan pertanggungjawaban keuangan sudah dilakukan. Maret: Progres kegiatan sedang berjalan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. April: Progres kegiatan sedang berjalan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Mei: Kegiatan sudah dilaksanakan, dan pertanggungjawaban keuangan sudah dilakukan. Juni: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -
18	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)	94.756.000	43.418.000	20.892.578	104	0	49,98	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres kegiatan sedang berjalan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. April: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Mei: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Juni: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -

19	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Keseekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Layanan)	511.367.000	328.746.000	17.110.000	1	0	49,98	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Mei: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Juni: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -
20	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Keseekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	003 Layanan Kinerja Satker (Layanan)	185.080.000	64.480.000	83.473.613	1	0	49,98	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Mei: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Juni: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Blokir A	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
21	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	27.332.000	13.516.000	8.264.481	5	2	49,98	Januari: Kegiatan sudah dilaksanakan menghasilkan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Februari: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: Progres kegiatan sedang berjalan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Mei: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Juni: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -
22	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	24.544.000	6.092.000	0	1	0	49,98	Januari: Capaian dihitung secara proporsional Februari: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Maret: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. April: Progres kegiatan sedang berjalan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Mei: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Juni: Progres kegiatan sedang berjalan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara bertahap. Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -



Kementerian PPN/
Bappenas



TRIWULAN II
2026

LAPORAN HASIL

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN**

247161

**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI**

**KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN**

LAPORAN KOMPONEN SATKER

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komponen Satker

247161 - BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

Periode : Triwulan 2 - 2026 (kumulatif)

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
6042.CAN.001 Pengadaan Perangkat TIK		Unit	9	0	184.926.000	159.850.000	86,44%					
1	051 Pengadaan Perangkat TIK		9	8	184.926.000	159.850.000	86.44%	Pelaksanaan	80.00%	Pengadaan AC 2 Pk 1 buah dan AC 1 PK 1 buah	Juni	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Barang / Material] menyesuaikan spesifikasi alat yg akan dibeli dengan harga dipasaran												
6042.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	1	0	353.202.000	21.826.990	6,18%					
2	051 Pengelolaan Data dan Informasi	Layanan	1	1	353.202.000	21.826.990	6.18%	Pelaksanaan	60.00%	fasilitasi jaringan internet di layanan balai	Juni	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Penerima Manfaat] pengguna jaringan bisa mengakses layanan internet dengan lancar												
6042.EBA.962 Layanan Umum		Layanan	1	0	353.624.000	61.915.690	17,51%					
3	051 Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga		1	1	353.624.000	61.915.690	17.51%	Pelaksanaan	52.00%	Fasilitasi layanan tata usaha Bulan Juni 2026	Juni	✓ Sudah

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
Permasalahan ❗ [Anggaran] masih terkendala blokir dalam rangka pemenuhan anggaran direktif presiden												
6042.EBA.994 Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	23.964.727.000	14.097.999.836	58,83%					
4	001 Gaji dan Tunjangan		1	1	19.050.750.000	11.947.397.606	62.71%	Pelaksanaan	61.00%	Pembayaran gaji dan tunjangan kinerja ASN Bulan Juni 2026	Juni	✔ Sudah
Permasalahan ✔ [Anggaran] diprediksi ada kekurangan belanja pegawai sehingga dilakukan revisi anggaran												
5	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1	1	4.913.977.000	2.150.602.230	43.77%	Pelaksanaan	55.00%	Operasional dan pemeliharaan perkantoran Bulan Juni 2026	Juni	✔ Sudah
Permasalahan ❗ [Anggaran] masih terkendala blokir anggaran dalam rangka pemenuhan direktif presiden												
6042.EBB.951 Layanan Sarana Internal		Unit	61	0	1.094.273.000	802.022.920	73,29%					
6	053 Pengadaan peralatan inventaris perkantoran		60	35	413.153.000	150.022.920	36.31%	Pelaksanaan	60.00%	Pengadaan AC 2 PK 1 buah, AC 1 PK 1 buah dan 6 kursi	Juni	✔ Sudah
Permasalahan ❗ [Anggaran] masih ada dana terblokir dalam rangka pemenuhan direktif presiden												
7	051 Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional		1	1	681.120.000	652.000.000	95.72%	Pelaksanaan	98.00%	telah selesai proses pengadaan kendaraan bermotor	Juni	✔ Sudah

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
6042.EBC.954 Layanan Manajemen SDM		Orang	104	0	94.756.000	20.892.578	22,05%					
8	051 Pengelolaan/Manajemen SDM		104	54	94.756.000	20.892.578	22.05%	Pelaksanaan	54.00%	fasilitasi pengelolaan SDM Bulan Juni 2026	Juni	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Anggaran] masih ada dana yg terkena blokir anggaran												
6042.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Lainnya		Orang	1	0	511.367.000	17.110.000	3,35%					
9	051 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM		1	1	511.367.000	17.110.000	3.35%	Pelaksanaan	55.00%	Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM Bulan Juni 2026	Juni	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Anggaran] masih ada blokir anggaran terkait pemenuhan direktif Presiden												
6042.EBD.003 Layanan Kinerja Satker		Layanan	1	0	185.080.000	83.473.613	45,10%					
10	051 Penyusunan Program dan Kegiatan Satker	Layanan	1	1	27.032.000	9.372.900	34.67%	Pelaksanaan	62.00%	penyusunan laporan PP 39 Triwulan II 2026 dan proses revisi anggaran	Juni	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Anggaran] masih ada blokir anggaran dalam rangka pemenuhan direktif presiden												
11	052 Pengelolaan Keuangan	Layanan	1	1	158.048.000	74.100.713	46.88%	Pelaksanaan	59.00%	pengelolaan keuangan bulan juni 2026	Juni	✓ Sudah

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
Permasalahan • ! [Anggaran] masih ada blokir anggaran karena pemenuhan direktif Presiden												
6042.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Layanan	5	0	27.332.000	8.264.481	30,24%					
12	051 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		5	3	27.332.000	8.264.481	30.24%	Pelaksanaan	61.00%	pengisian monev bapenas juni 2026	Juni	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Anggaran] masih terkendala blokir anggaran dalam rangka pemenuhan direktif presiden												
6042.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja		Layanan	1	0	24.544.000	0	0,00%					
13	051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP		1	0	24.544.000	0	0.00%	Pelaksanaan	25.00%	penyiapan data dukung laporan SPIP	Juni	! Belum
Permasalahan • ! [Barang / Material] bahan untuk data dukung pembuatan laporan SPIP masih belum tersarp dengan baik												
6077.AEF.I01 Sosialisasi dan Diseminasi		orang	190	0	75.246.000	180.000	0,24%					
14	052 Publikasi Layanan Jasa Teknis	ORANG	190	102	75.246.000	180.000	0.24%	Pelaksanaan	54.00%	update layanan informasi BBSPJPPI baik online maupun offline	Juni	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Stakeholders Terkait (Eksternal)] belum mengikuti pameran yang sesuai tema kompetensi BBSPJPPI												

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
6077.BAD.001 Jasa Pelayanan Teknis Pengujian		Industri	485	0	7.211.180.000	2.072.600.126	28,74%					
15	051 Jasa Pelayanan Teknis Pengujian		485	212	6.557.134.000	2.065.700.126	31.50%	Pelaksanaan	60.00%	layanan jasa pengujian Bulan Juni 2026	Juni	✔ Sudah
Permasalahan • ! [Anggaran] masih ada blokir anggaran dalam rangka pemenuhan direktif Presiden												
16	052 Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Pengujian		1	0	654.046.000	6.900.000	1.05%	Pelaksanaan	35.00%	dalam rangka persiapan akreditasi pengujian	Juni	! Belum
Permasalahan • ! [Stakeholders Terkait (Eksternal)] menunggu jadwal auditor dari KAN												
6077.BAD.002 Jasa Penyelenggara Uji Profisiensi		Industri	15	0	123.360.000	3.000.000	2,43%					
17	052 Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Uji Profisiensi		1	0	41.460.000	1.500.000	3.62%	Pelaksanaan	31.00%	persiapan matriks untuk uji profisiensi	Juni	! Belum
Permasalahan • ! [Waktu] pelaksanaan uji profisiensi rencana dilakukan di Triwulan III												
18	051 Jasa Pelayanan Uji Profisiensi		15	11	81.900.000	1.500.000	1.83%	Pelaksanaan	50.00%	persiapan pelaksanaan uji profisiensi	Juni	✔ Sudah

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
Permasalahan ! [Anggaran] masih adanya blokir anggaran karena pemenuhan direktif presiden												
6077.BAD.003 Jasa Pelayanan Produsen Bahan Acuan		Industri	5	0	62.430.000	0	0,00%					
19	051 Jasa Pelayanan Produsen Bahan Acuan		5	0	8.240.000	0	0.00%	Persiapan	10.00%	dikarenakan belum akreditasi sehingga belum membuka jasa layanan PBA	Juni	! Belum
Permasalahan ! [Barang / Material] matriks PBA belum stabil												
20	052 Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Produsen Bahan Acuan		1	0	54.190.000	0	0.00%	Persiapan	10.00%	dikarenakan matriks produsen bahan acuan	Juni	! Belum
Permasalahan ! [Barang / Material] matriksnya tidak stabil												
6077.BAD.004 Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi		Industri	40	0	1.919.918.000	154.121.539	8,03%					
21	051 Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi		40	32	1.862.228.000	98.544.769	5.29%	Pelaksanaan	60.00%	layanan jasa kalibrasi Bulan Juni 2026	Juni	✓ Sudah
Permasalahan ! [Anggaran] masih ada blokir anggaran karena pemenuhan direktif presiden												

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
22	052 Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Kalibrasi		1	1	57.690.000	55.576.770	96.34%	Pelaksanaan	60.00%	perbaikan data dukung PRL lab kalibrasi	Juni	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Barang / Material] menyiapkan data dukung temuan												
6077.BAD.005 Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi		Industri	220	0	876.446.000	158.180.433	18,05%					
23	052 Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi		1	1	164.736.000	37.662.853	22.86%	Pelaksanaan	53.00%	permohonan asesmen/surveilen/witness/iuran tahunan dalam rangka akreditasi lembaga	Juni	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Anggaran] terdapat blokir anggaran dalam rangka pemenuhan direktif presiden												
24	051 Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi		220	130	711.710.000	120.517.580	16.93%	Pelaksanaan	60.00%	layanan jasa sertifikasi Juni 2026	Juni	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Anggaran] masih ada blokir anggaran dalam rangka pemenuhan direktif presiden												
6077.BAD.006 Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri		Industri	8	0	373.900.000	10.160.000	2,72%					
25	051 Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri		8	7	373.900.000	10.160.000	2.72%	Pelaksanaan	50.00%	promosi bimtek baik online maupun offline	Juni	✓ Sudah

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
Permasalahan ❗ [Anggaran] masih terdapat blokir anggaran dalam rangka pemenuhan direktif presiden												
6077.BAD.008 Jasa Pelayanan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri		Industri	9	0	399.020.000	29.982.930	7,51%					
26	051 Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri		9	1	399.020.000	29.982.930	7.51%	Pelaksanaan	50.00%	lanjutan jasarancang bangun PT Saprotan	Juni	✔ Sudah
Permasalahan ✔ [Stakeholders Terkait (Eksternal)] perusahaan terbuka dalam aplikasi saran dr BBSPJPPi												
6077.BAD.009 Jasa Pelayanan Verifikasi		Industri	16	0	157.824.000	5.972.454	3,78%					
27	051 Jasa Pelayanan Verifikasi		16	21	157.824.000	5.972.454	3.78%	Pelaksanaan	58.00%	layanan jasa TKDN bulan juni 2026	Juni	✔ Sudah
Permasalahan ❗ [Anggaran] masih terdapat blokir anggaran dalam rangka pemenuhan direktif presiden												
6077.BAD.010 Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal		Industri	25	0	58.636.000	2.156.000	3,68%					
28	051 Penyelenggaraan Lembaga Pemeriksa Halal		25	11	37.000.000	2.156.000	5.83%	Pelaksanaan	50.00%	fasilitasi layanan halal di Bulan Juni 2026	Juni	✔ Sudah
Permasalahan ❗ [Anggaran] masih adanya blokir anggaran dalam rangka pemenuhan direktif Presiden												

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
29	052 Pengembangan Kelembagaan Jaminan Produk Halal		1	0	21.636.000	0	0.00%	Pelaksanaan	11.00%	belum mendapatkan jadwal asesmen lembaga halal	Juni	! Belum
Permasalahan • ! [Stakeholders Terkait (Eksternal)] menunggu jadwal dr BPJPH terkait asesmen halal												
	6077.CAH.001 Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan	Unit	55	0	3.571.977.000	2.049.725.754	57,38%					
30	051 Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan		55	17	3.571.977.000	2.049.725.754	57.38%	Pelaksanaan	30.00%	pengadaan 17 alat lab antara lain 4 mikropipet, 4HT, 2 buku, 1 alat sampling, 2 refrigerator, 1 oven, 1 pompa vacum, 2 uespa	Juni	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Anggaran] masih adanya blokir anggaran dalam rangka pemenuhan direktif Presiden												

Semarang, 03 Juli 2026

Mengetahui,
Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan
Pencemaran Industri



Sofyari Rahman

NIP. 198403252009111001



Kementerian PPN/
Bappenas



2026

Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
Kedeputan Pengendalian, Evaluasi, dan
Manajemen Risiko Pembangunan